



**ANALISIS KONVERGENSI ANTAR PROVINSI DI
INDONESIA SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH TAHUN 2001-2012**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Andrian Syah Malik

NIM 7111410005

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin

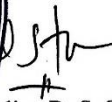
Tanggal : 15 Desember 2014

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing




Lestari Karolina Br S, S.E., M.Si
NIP. 198007172008012016



Dyah Maya Nihayah, S.E, M.Si.
NIP. 197705022008122001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Januari 2015

Penguji I



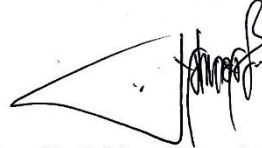
Dr. Suchatiningsih, DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

Penguji II



Prasetyo Ari Bowo, S.E, M.Si
NIP. 197902082006041002

Penguji III



Dyah Maya Nihayah, S.E, M.Si
NIP. 197705022008122001

Mesgetahui
Rekan
Fakultas Ekonomi



Dr. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 15 Desember 2014



Andrian Syah Malik
NIM. 7111410005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang akan mengubahnya (Q.S: Ar-Ra'd:11).
- Percaya diri adalah kunci dari kesuksesan (Al Hadits).
- Waktu ketika ditempa kesulitan adalah waktu dimana akan ditunjukkan akhir cerita bahagia.

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua, kakak, adik dan segenap keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang tidak dapat tergantikan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kenikmatan iman dan islam kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Konvergensi Antar Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (satu) guna meraih gelar sarjana ekonomi. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan berbagai fasilitas penunjang keilmuan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan kebijakannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggunakan fasilitas kampus dalam menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi.
3. Lesta Karolina Br S, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan ujian skripsi.
4. Dyah Maya Nihayah, SE. M.Si. Dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan, arahan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

5. Dr. Sucihatingsih, DWP, M.Si. Dosen penguji satu yang telah mengoreksi skripsi ini hingga menjadi benar.
6. Prasetyo Ari Bowo, SE. M.Si. Dosen penguji dua yang telah mengoreksi skripsi ini hingga menjadi benar.
7. Yozi Aulia Rahman, SE. M.Sc. Dosen Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan waktu, bimbingan serta saran dalam berdiskusi tentang topik skripsi kepada penulis serta bimbingan dan masukan ketika penulis menjadi anggota BEM KM FE 2013.
8. Seluruh Dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
9. Ayah, Ibu tercinta atas segala kesabaran, cinta, kasih, sayang, pengorbanan dan dukungannya.
10. Kakak Vera Anggraini dan adik Faisal Akbar tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
11. Kakanda Avanza (Abik Afada Garuda Bangsa) motivator penulis menjadi aktivis kampus sekaligus sebagai penasehat spiritual.
12. Novi Putra Kusuma, Aditya Pradana, Mustamarudin, Erfan Mosliandhi, Yoga Fajar Kharisma, Istiadi Priyo Utomo dan Muhammad Fahri Zaki kawan-kawan yang memberikan arti pentingnya pengorbanan untuk saling menolong dan berbagi.
13. Zacky Vio, Anjas Geenit, Bona Varez kawan seperjuangan download film selama masa-masa kuliah.

14. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2010 terimakasih atas kebersamaannya.
15. Kawan-kawan sesama anggota BEM FE tahun 2012 dan 2013 terimakasih atas kebersamaannya.
16. Kawan-kawan sesama anggota Eksis Rohis FE Unnes tahun 2011, 2012 dan 2013 terimakasih atas kebersamaan yang tidak dapat tergantikan.
17. Teman-teman kos Ananta, Muh, Umam yang telah bersama dalam canda dan tawa.
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan doa dan motivasi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini memberikan tambahan manfaat dan wawasan keilmuan kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu mohon sekiranya jika ada kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 15 Desember 2014



Andrian Syah Malik
NIM. 7111410005

SARI

Malik, Andrian Syah. 2014. “*Analisis Konvergensi Antar Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012*”, Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dyah Maya Nihayah, SE. M.Si.

Kata Kunci: Konvergensi, Otonomi Daerah, Penanaman Modal Asing, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi seperti suku bangsa, budaya, sumber daya alam, pendidikan, sosial dan ekonomi di setiap daerah. Untuk mengatur tingkat keanekaragaman tersebut, pembangunan di tingkat daerah diatur oleh pemerintah pusat dengan menjadikan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional. Hal tersebut membuat provinsi-provinsi yang kaya sumber daya alam menuntut pemberian transfer anggaran yang lebih dan pemberian hak dan wewenang kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di tingkat daerah.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu pertama, mengidentifikasi tingkat konvergensi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, menganalisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghitungan konvergensi sigma menggunakan standar deviasi log PDRB per kapita antar provinsi, sementara penghitungan konvergensi beta menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi konvergensi sigma dan konvergensi beta setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012. Penanaman modal asing (PMA), dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah.

ABSTRACT

Malik, Andrian Syah. 2014. *“Analyze Convergence All Regions In Indonesia After Decentralization 2001-2012”*. Skripsi. The Department of Economic Development. Economic Faculty. Semarang State University. Supervisor Dyah Maya Nihaya, SE. M.Si.

Keyword: Convergence, Regional Autonomy, FDI, Balanced Budget, HDI.

Indonesia is a country which has many kinds of ethnic groups, cultures, natural resources, educations, socials, and economics in every region. To arrange those all problems, development at the local level is set by the central government by becoming the Island of Java as the center of the national economy. That problem makes the provinces which rich in natural resources demand for more budget transfers and granting rights and privileges to each region to set up and manage their own affairs at the local level.

This study has two objectives: first, to identify the level of convergence in Indonesia after the implementation of regional autonomy. Second, to analyze the influence of foreign direct investment (PMA), the balance budget and the human development index (IPM) on the growth of GDP per capita in Indonesia after the implementation of regional autonomy in 2001-2012.

The data used in this research is secondary data published by the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Calculations of sigma convergence used standard deviation log PDRB per capita among the provinces, while the calculation of beta convergence used panel data regression analysis with fixed effect model approach.

The results of this study indicate that there is convergence sigma and beta convergence after the implementation of regional autonomy in 2001-2012. Foreign direct investment (PMA), the fund balance and the human development index (IPM) have positive effects on the growth of GDP per capita in Indonesia after the implementation of regional autonomy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Mafaat Penelitian	15
2. LANDASAN TEORI	16
2.1 Otonomi Daerah	16
2.1.1 Pemerintah Pusat	17
2.1.2 Pemerintah Daerah	17
2.2 Konvergensi	18
2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	21
2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)	23
2.5 Pengeluaran Pemerintah Untuk Daerah	26

2.5.1	Dana Bagi Hasil	27
2.5.2	Dana Alokasi Umum	27
2.5.3	Dana Alokasi Khusus	29
2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	30
2.7	Penelitian Terdahulu	32
2.8	Hubungan Antar Variabel	40
2.8.1	Hubungan Penanaman Modal Asing Dengan PDRB per kapita.....	40
2.8.2	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Untuk Daerah Dengan PDRB per kapita	41
2.8.3	Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dengan PDRB per kapita	42
2.9	Kerangka Pemikiran Teoritis	43
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	44
3.	METODE PENELITIAN	45
3.1	Jenis Dan Desain Penelitian	45
3.2	Variabel Penelitian	45
3.2.1	Variabel Dependen	46
3.2.2	Variabel Independen	46
3.2.3	Variabel Operasional	46
3.3	Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel	47
3.4	Metode Pengumpulan Data	48
3.5	Metode Analisis Data	48
3.6	Pengujian Model	49
3.7	Pengukuran Konvergensi	52
3.7.1	Konvergensi Sigma (<i>Sigma Convergence</i>)	52
3.7.2	Konvergensi Beta (<i>Beta Convergence</i>)	53
3.7.2.1	Konvergensi Absolut (<i>Absolute Convergence</i>)	53

3.7.2.2	Konvergensi Kondisional (<i>Conditional Convergence</i>)	53
3.8	Kecepatan Konvergensi	54
4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Perkembangan Variabel Yang Diamati	55
4.1.1	PDRB per kapita	55
4.1.2	Penanaman Modal Asing (PMA)	56
4.1.3	Pengeluaran Pemerintah Untuk Daerah	58
4.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60
4.2	Konvergensi Sigma	63
4.3	Pemilihan Model	64
4.4	Konvergensi Beta (<i>Beta Convergence</i>)	66
4.4.1	Konvergensi Absolut (<i>Absolute Convergence</i>)	67
4.4.2	Konvergensi Kondisional (<i>Conditional Convergence</i>)	68
4.5	Analisis Kecepatan Konvergensi	71
4.6	Pembahasan	73
4.6.1	Konvergensi Sigma (<i>Sigma Convergence</i>)	73
4.6.2	Konvergensi Beta (<i>Beta Convergence</i>)	74
4.6.3	Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita Di Indonesia	75
4.6.4	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Daerah (Gi) Terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita Di Indonesia	76
4.6.5	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita Di Indonesia	77
5.	PENUTUP	78
5.1	Simpulan.....	78
5.2	Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi populasi dan PDB Indonesia berdasarkan kelompok pulau utama 1973, 1995	2
Tabel 1.2	Dana Perimbangan Pemda Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2000 – 2004	5
Tabel 1.3	Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi Berdasarkan Jumlah Proyek dan Investasi Tahun 2010-2012	10
Tabel 14	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi dan Nasional Tahun 2006 – 2012	12
Tabel 2.1	Matrik Penelitian Terdahulu.....	37
Table 4.1	PDRB Per Kapita Seluruh Provinsi Di Indonesia (ADHK) 2000 Tahun 2001 – 2012	55
Tabel 4.2	Realisasi PMA Menurut Provinsi Tahun 2001-2012	57
Tabel 4.3	Dana Perimbangan Seluruh Provinsi Di Indonesia 2001-2012	59
Tabel 4.4	Perkembangan IPM Seluruh Provinsi Di Indonesia 2001-2012	61
Tabel 4.5	Tabel Konvergensi Sigma (<i>Sigma Convergence</i>)	63
Tabel 4.6	Uji F Konvergensi Absolut	65
Tabel 4.7	Uji Hausman Konvergensi Absolut	65
Tabel 4.8	Uji F Konvergensi Kondisional	66
Tabel 4.9	Uji Hausman Konvergensi Kondisional	66
Tabel 4.10	Estimasi Regresi Konvergensi Absolut Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	67

Tabel 4.11 Estimasi Regresi Konvergensi Kondisional Dengan Pendekatan <i>Fixed</i>	
<i>Effect</i>	68
Tabel 4.12 Nilai Konvergensi Beta Dan Kecepatan Konvergensi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Konvergensi Sigma 2001-2012	64
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi seperti suku bangsa, budaya, sumber daya alam, pendidikan, sosial dan ekonomi yang sangat rentan akan terjadinya gejolak politik dalam negeri. Untuk mengatur kestabilan politik dalam negeri, pemerintah pusat selaku otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan nasional menerapkan kebijakan sentralisasi. Sentralisasi merupakan hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerahnya.

Pelaksanaan sistem sentralisasi tersebut sejatinya belum menerapkan amanah UUD 1945 yang mengharuskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas asas otonomi daerah. Sehingga tatanan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat selaku otoritas tertinggi, salah satunya adalah pembangunan nasional lebih terpusat di pulau Jawa dengan alasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tersedia relatif lebih baik dibandingkan yang tersedia di luar Jawa. Perumusan tersebut diharapkan kemajuan yang telah tercapai oleh provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan sendirinya akan diikuti oleh kemajuan di provinsi-provinsi lain di luar Jawa atau biasa dikenal dengan istilah *trickle down effect* (Tambunan, 2001:22). Akan tetapi, gagasan tersebut tidak dapat terjadi karena

terbatasnya anggaran pembangunan pada waktu itu yang membuat proses pembangunan dan pemerataan tidak dapat dilaksanakan secara bersama, sehingga kemajuan provinsi-provinsi di pulau Jawa tidak diikuti oleh provinsi-provinsi yang berada di luar Jawa sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan. Tabel 1.1 menjelaskan kondisi ketimpangan di Indonesia.

Tabel 1.1
Distribusi Populasi dan PDB Indonesia
Berdasarkan Kelompok Pulau Utama 1975, 1993
(dalam persen)

Pulau Utama	Populasi		Produk Domestik Bruto	
	1975	1993	1975	1993
Sumatera	18	21	32	23
Jawa	63	59	50	59
Bali	2	2	1	2
NTB & NTT	4	4	2	2
Kalimantan	4	5	7	9
Sulawesi	7	7	5	4
Maluku dan Irian Jaya	1	2	3	2
Indonesia	100	100	100	100

Sumber: Statistik Indonesia dalam Garcia (1997)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Indonesia cenderung terpusat di pulau Jawa terbukti pada tahun 1973 jumlah penduduk Indonesia di pulau Jawa sebesar 63% dari total jumlah penduduk Indonesai dengan jumlah kontribusi terhadap pendapatan nasional di Indonesia sebesar 50%. Sementara provinsi dengan jumlah populasi paling sedikit berada di pulau Maluku dan Irian Jaya sebesar 1% dengan kontribusi terhadap pendapatan nasional sebesar 3%. Kemudian pada tahun 1993 pulau Jawa masih mendominasi dalam hal populasi meskipun jumlahnya relatif menurun dari tahun 1973 menjadi 59% dari total populasi jumlah penduduk Indonesia, sementara kontribusi terhadap pendapatan nasional pulau Jawa mengalami peningkatan menjadi 59%.

Sedangkan provinsi dengan jumlah populasi paling sedikit adalah provinsi Maluku dan Irian Jaya sebesar 2% dengan jumlah kontribusi terhadap pendapatan nasional sebesar 2%.

Kondisi ketimpangan regional Indonesia menurut Tambunan (2001:237) disebabkan antara lain

selama pemerintah orde baru, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam (SDA) di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya, selama itu daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak (Yafiz, 1999). Juga pinjaman dan bantuan luar negeri, penanaman modal asing (PMA), dan tata niaga dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah daripada potensi ekonominya (Basri, 1994; Sondakh, 1999).

Ketimpangan yang berlangsung sangat lama tersebut memicu adanya pergolakan-pergolakan di daerah tahun 1997-1998 yang disertai dengan krisis ekonomi di negara-negara Asia termasuk Indonesia menyebabkan masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis berdasarkan pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal tersebut didasarkan bahwa karakteristik daerah yang berbeda membuat permasalahan yang ditimbulkan semakin kompleks dan multidimensional sehingga tidak akan mampu apabila hanya terpusat pada pemerintah pusat (Basri, 2002: 170).

Untuk menjawab berbagai tuntutan tersebut maka dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang mengganti UU. No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25 Tahun 1999 yang mengganti UU No 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai

dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan suatu peluang yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah untuk mengaktualisasi diri dengan segala potensi dan keunggulan yang dimiliki secara optimal untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah (Basri, 2002: 177). Sementara tujuan pokok dari adanya UU tentang perimbangan keuangan adalah upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, guna menciptakan pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah (Sidik, 1999 dalam Tambunan, 2001:241).

Otonomi daerah di Indonesia mulai aktif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2001 dalam bentuk tiga level yaitu provinsi, kabupaten/kota dan desa (aritenang, 2009:3). Kemudian dalam pelaksanaannya, kedua undang-undang tentang pemerintah daerah yaitu No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 dengan alasan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 masih kuatnya campur tangan pemerintah pusat dalam mengatur jalannya pemerintah di tingkat daerah, dengan tindakan tersebut hakekat otonomi belum benar-benar dapat di terapkan. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih, tetapi terdapat kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti kebijakan luar negeri, keamanan nasional, keuangan, agama, kebijakan makro ekonomi dan kebijakan politik nasional (pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004:13).

Berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah memberikan transfer anggaran dalam bentuk dana perimbangan yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan berguna untuk menghapus jebakan inefisiensi pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi dan kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Seymor, 2002 dalam Aritenang, 2009:2).

Berikut adalah tabel 1.2 yang menjelaskan dana perimbangan yang diterima oleh tiap-tiap provinsi dalam enam tahun terakhir dari tahun 2007-2012.

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Perimbangan Pemda Provinsi
Dalam (ribu rupiah) Tahun 2007 – 2012

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	1,804,923	2,605,331	1,570,604	1,551,799	2,262,045	1,972,238
Sumut	951,081	1,039,050	1,167,565	1,175,258	1,373,898	1,686,144
Sumbar	633,866	744,202	789,840	769,697	897,641	1,054,460
Riau	2,135,945	2,687,364	1,879,149	1,706,101	3,226,836	2,998,999
Jambi	686,557	745,861	802,060	801,125	1,075,208	1,019,543
Sumsel	1,280,898	1,424,574	1,333,161	1,575,610	1,992,557	2,205,078
Bengkulu	445,656	529,785	589,498	603,718	712,256	854,530
Lampung	686,785	817,633	829,026	837,196	1,063,287	1,192,115
DKI	7,253,025	8,702,813	8,650,836	10,306,090	9,149,709	9,111,459
Jabar	1,756,094	1,903,730	2,172,729	2,105,354	2,526,078	2,235,857
Jateng	1,419,343	1,504,184	1,691,853	1,757,664	1,950,189	2,130,486
DIY	480,923	601,802	631,011	615,335	722,340	850,513
Jatim	1,755,896	1,798,151	2,093,556	2,412,238	2,528,086	2,785,081
Bali	525,304	576,551	636,608	638,093	705,288	852,218
NTB	534,453	626,994	701,176	781,931	855,310	1,046,195
NTT	608,328	708,741	767,567	762,640	887,291	1,102,993
Kalbar	711,608	865,203	970,706	914,712	1,037,860	1,207,643
Kalteng	726,574	859,670	913,062	961,087	1,083,088	1,199,620
Kalsel	623,583	790,997	1,004,990	904,819	1,195,565	1,038,923
Kaltim	3,096,452	4,050,187	3,122,061	4,015,479	5,295,876	4,392,796
Sulut	496,497	613,567	674,268	666,514	729,361	889,074
Sulteng	562,092	701,890	756,439	744,570	864,099	988,225
Sulsel	810,026	894,934	914,503	952,354	1,106,989	1,323,874

Sultengg	516,641	657,211	705,063	726,363	817,385	1,010,576
Maluku	535,177	648,433	704,207	717,187	828,273	950,038
Papua	2,043,982	1,436,993	1,563,055	1,516,928	1,893,485	2,155,378

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2000-2012

Pada tahun 2007 sebelum terjadinya krisis global, provinsi dengan penerimaan dana perimbangan tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 7,2 miliar rupiah, kemudian provinsi Kalimantan Timur sebesar 3 miliar rupiah dan provinsi Riau sebesar 2,1 miliar rupiah. Sedangkan provinsi dengan penerimaan dana perimbangan terendah adalah provinsi Bengkulu sebesar 445 juta rupiah, kemudian provinsi DIY sebesar 480 juta rupiah dan provinsi Sulut sebesar 496 juta rupiah.

Pada tahun 2008 masa terjadinya krisis ekonomi global, provinsi-provinsi dengan penerimaan dana perimbangan tertinggi adalah provinsi DKI sebesar 8,7 miliar rupiah, kemudian provinsi Kalimantan Timur sebesar 4 miliar rupiah dan provinsi Jabar sebesar 1,9 miliar rupiah. Sementara ketiga provinsi dengan penerimaan dana perimbangan terendah adalah provinsi Bengkulu sebesar 529 juta rupiah, kemudian provinsi DIY sebesar 601 juta rupiah dan provinsi Sulut sebesar 613 juta rupiah.

Pada tahun 2012 ketiga provinsi dengan penerimaan dana perimbangan tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 9,1 miliar rupiah, kemudian provinsi Kaltim sebesar 4,3 miliar rupiah dan provinsi Riau sebesar 2,9 miliar rupiah. Sementara ketiga dengan penerimaan dana perimbangan terendah adalah provinsi DIY sebesar 850 juta rupiah, kemudian provinsi Bali sebesar 852 juta rupiah dan provinsi Bengkulu sebesar 854 juta rupiah.

Dana perimbangan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan, infrastruktur air dan sanitasi, infrastruktur desa guna mewujudkan kesejahteraan di segala lapisan masyarakat. Dengan adanya kemajuan di bidang tersebut maka daerah-daerah yang relatif masih tertinggal mampu mengejar dan menyejajarkan diri dengan daerah-daerah maju melalui peningkatan pendapatan per kapita daerah. Proses pengejaran diri yang dilakukan oleh daerah miskin dikenal dengan istilah konvergensi.

Konvergensi adalah terjadinya penurunan perbedaan pendapatan per kapita dari negara atau wilayah miskin dengan negara atau kaya yang didasarkan atas pertumbuhan ekonomi mereka yang sangat cepat (Abramovitz, 1986:386). Lebih lanjut Mankiw (2004:216) menjelaskan bahwa konvergensi akan terjadi apabila negara atau daerah miskin dengan pendapatan yang rendah akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara atau daerah kaya dengan pendapatan yang tinggi sehingga dalam jangka panjang semua negara-negara akan mencapai tingkat konvergensi yang sama. Hal tersebut didasarkan fakta bahwa perekonomian suatu wilayah mengarah kepada kondisi *steady state*, apabila wilayah atau daerah sudah dalam kondisi *steady state* maka tingkat perekonomian akan berjalan melambat.

Barro dan Sala-I-Martin (1992:224) menjelaskan bahwa konvergensi dapat dihitung berdasarkan dua konsep yaitu konvergensi sigma (*sigma convergence*) dan konvergensi beta (*beta convergence*). Konvergensi sigma diukur melalui tingkat dispersi dari log pendapatan per kapita tiap-tiap daerah. Apabila dispersi

pendapatan mengalami penurunan sepanjang waktu maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan antar provinsi semakin menurun atau terjadi konvergensi sigma.

Konvergensi beta (*beta convergence*) mengacu adanya gagasan bahwa negara atau daerah miskin mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara atau daerah kaya. Konvergensi beta dihitung berdasarkan faktor-faktor yang menentukan dalam konvergensi. Konvergensi ini juga secara langsung berkaitan dengan model Solow-Swan yang mengindikasikan adanya tingkat pengembalian modal yang semakin menurun (*deminishing return*) sehingga akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Kondisi tersebut diasumsikan terjadi di negara-negara kaya yang tingkat pendapatannya tidak dapat meningkat lagi karena tambahan investasi tidak dapat menambah pendapatan sementara di daerah-daerah miskin sebagian besar sumber daya yang dimiliki belum sepenuhnya terserap dalam proses produksi maka diperlukan tambahan investasi untuk meningkatkan pendapatan.

Todaro dan Smith (2006:98-99) menjelaskan bahwa dua alasan penting untuk berharap bahwa daerah berkembang akan menyusul dengan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah maju yaitu :

Pertama, transfer teknologi. Dengan adanya transfer teknologi daerah berkembang tidak harus melakukan penemuan teknologi untuk dapat meningkatkan output produksi meskipun harus membayar royalti, tetapi lebih murah apabila dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan riset dan pengembangan. *Kedua*, negara atau daerah maju pada saat ini mempunyai jumlah modal fisik yang besar dan modal manusia dalam tingkatan yang tinggi; dalam analisis produksi, kondisi tersebut akan menghasilkan output yang besar pula. Namun produk marjinal dan profitabilitas investasi di negara atau daerah maju yang mempunyai intensitas modal yang lebih tinggi akan lebih rendah daripada di negara berkembang, karena adanya *the law of deminishing return*. Hasilnya, tingkat investasi yang lebih tinggi diharapkan akan terjadi di

negara-negara berkembang, hingga kira-kira tercapai tingkatan modal per tenaga kerja yang setara dengan yang terjadi di negara atau daerah maju.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk mencapai tingkat konvergensi, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan investasi modal yang besar untuk mengeksplorasi berbagai sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap negara-negara berkembang. Seperti halnya masalah yang dialami oleh negara-negara berkembang lainnya, sumber daya modal yang dimiliki masih terbatas dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi keterbatasan sumber modal tersebut, dapat diperoleh melalui penanaman modal asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) yang bertujuan sebagai sumber modal alternatif bagi negara-negara berkembang.

Beberapa penelitian tentang investasi asing seperti yang dilakukan oleh Syed Tehseen Jawaid dan Syed Ali Raza (2012), Krishna Chaitanya Vadlamannati (2009) menyimpulkan bahwa penanaman modal asing dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang dikategorikan dengan penghasilan menengah dan rendah. Sementara untuk negara dengan penghasilan tinggi atau kaya tidak ada pengaruh antara penanaman modal asing dengan pertumbuhan ekonomi. Selain dampak positif, investasi asing memiliki dampak negatif yang ditimbulkan antara lain negara tuan rumah hanya memiliki manfaat yang sedikit karena sebagian besar keuntungan yang dihasilkan akan ditransfer kembali ke negara pemilik perusahaan-perusahaan asing (Jawaid, 2012:5).

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari adanya investasi asing guna meningkatkan dan mempercepat tingkat perekonomian dalam negeri.

Investasi asing di Indonesia tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia dengan besaran yang diterima oleh tiap-tiap provinsi mengalami perbedaan. Berikut tabel 1.3 yang menyajikan investasi asing di Indonesia berdasarkan enam tahun terakhir yang dimulai pada tahun 2007-2012.

Tabel 1.3
Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi
Berdasarkan Jumlah Investasi (US\$ Juta)
Tahun 2007 -2012

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	17.4	15	0.4	4.6	22.5	172.3
Sulut	189.7	127.2	139.7	181.1	753.7	645.3
Sumbar	58.7	28.1	0.2	7.9	22.9	75.0
Riau	724	460.9	251.6	86.6	212.3	1,152.9
Jambi	17.6	36.1	40.5	37.2	19.5	156.3
Sumsel	213.8	114.7	56.8	186.3	557.3	786.4
Bengkulu	50	13.0	1.1	25.1	43.1	30.4
Lampung	124.5	67.0	32.7	30.7	79.5	114.3
DKI	4676.9	9,927.6	5,510.8	6,429.3	4,824.1	4,107.7
Jabar	1326.9	2,552.2	1,934.4	1,692.0	3,839.4	4,210.7
Jateng	100.7	135.6	83.1	59.1	175.0	241.5
DIY	0.8	16.7	8.1	4.9	2.4	84.9
Jatim	1689.6	457.1	422.1	1,769.2	1,312.0	2,298.8
Bali	50.4	81.0	227.2	278.3	482.1	482.0
NTB	5.9	14.4	2.9	220.5	465.1	635.8
NTT	0.4	1.4	4.0	3.8	5.5	8.7
Kalbar	11.2	39.8	27.8	170.4	500.7	397.5
Kalteng	77.6	62.7	4.9	546.6	543.7	524.7
Kalsel	59.8	0.2	171.8	202.2	272.1	272.3
Kaltim	152	12.6	79.9	1,092.2	602.4	2,014.1
Sulut	9.7	35.5	57.7	226.8	220.2	46.7
Sulteng	7.1	1.5	3.3	138.5	370.4	806.5
Sulsel	62.8	27.9	77.0	441.8	89.6	582.6
Sultengg	300.5	0.5	3.6	14.0	17.0	35.7
Maluku	10	15	5	2.9	11.7	8.5
Papua	0.4	17.8	1.8	329.6	1,312.0	1,202.4

Sumber: *Statistik Indonesia*

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa tahun 2007 masa sebelum terjadinya krisis ekonomi global, provinsi dengan penerimaan investasi asing tertinggi adalah provinsi DKI sebesar 4676.9 juta dolar, kemudian provinsi Jatim sebesar 1689.6 juta dolar dan provinsi Jabar sebesar 1326.9 juta dolar. Sedangkan provinsi dengan penerimaan investasi asing terendah adalah provinsi Papua dan NTT sebesar 0,4 juta dolar dan provinsi DIY sebesar 0,8 juta dolar.

Tahun 2008 masa terjadinya krisis ekonomi global, provinsi dengan penerimaan investasi asing tertinggi adalah provinsi DKI sebesar 9,927.6 juta dolar, kemudian provinsi Jabar sebesar 2,552.2 juta dolar dan provinsi Aceh sebesar 460.9 juta dolar. Sedangkan provinsi dengan penerimaan investasi asing terendah adalah provinsi Kalsel sebesar 0,2 juta dolar, kemudian Sultengg sebesar 0,5 juta dolar dan provinsi Sulteng 1,5 juta dolar.

Tahun 2010 setelah terjadinya krisis ekonomi global, provinsi dengan penerimaan investasi asing tertinggi adalah provinsi 6,429.3 juta dolar, kemudian provinsi Jatim sebesar 1,769.2 juta dolar dan provinsi Jabar sebesar 1,692.0 juta dolar. Sedangkan provinsi dengan penerimaan investasi asing terendah adalah provinsi Maluku 2,9 juta dolar, kemudian provinsi NTT 3,8 juta dolar dan provinsi Aceh sebesar 4,6 juta dolar.

Investasi asing bertujuan untuk meningkatkan tingkat perekonomian, juga bertujuan untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia di negara tuan rumah karena adanya teknologi baru harus diikuti adanya transfer pengetahuan dan pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, inovasi produk serta menghasilkan output yang memiliki daya saing. Indikator untuk melihat

pembangunan manusia dapat melalui indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI).

IPM mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan tiga kategori, yaitu: (1) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup; (2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah; dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan (Kuncoro, 2004:115). Berikut adalah tabel 1.4 yang menjelaskan tentang IPM berdasarkan lima tahun terakhir dari tahun 2008-2012.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia dalam (persen)
Tahun 2008 - 2012

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	70,76	71,31	71,70	72,16	72,51
Sumatera Utara	73,29	73,80	74,19	74,65	75,13
Sumatera Barat	72,96	73,44	73,78	74,28	74,70
Riau	75,09	75,60	76,07	76,53	76,90
Jambi	71,99	72,45	72,74	73,3	73,78
Sumatera Selatan	72,05	72,61	72,95	73,42	73,99
Bengkulu	72,14	72,55	72,92	73,4	73,93
Lampung	70,30	70,93	71,42	71,94	72,45
DKI Jakarta	77,03	77,36	77,60	77,97	78,33
Jawa Barat	71,12	71,64	72,29	72,73	73,11
Jawa Tengah	71,60	72,10	72,49	72,94	73,36
Yogyakarta	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75
Jawa Timur	70,38	71,06	71,62	72,18	72,83
Bali	70,98	71,52	72,28	72,84	73,49
Nusa Tenggara Barat	64,12	64,66	65,20	66,23	66,89
Nusa Tenggara Timur	66,15	66,60	67,26	67,75	68,28
Kalimantan Barat	68,17	68,79	69,15	69,66	70,31
kalimantan Tengah	73,88	74,36	74,64	75,06	75,46
Kalimantan Selatan	68,72	69,30	69,92	70,44	71,08
Kalimantan Timur	74,52	75,11	75,56	76,22	76,71

Sulawesi Utara	75,16	75,68	76,09	76,54	76,95
Sulawesi Tengah	70,09	70,70	71,14	71,62	72,14
Sulawesi Selatan	70,22	70,94	71,62	72,14	72,70
Sulawesi Tenggara	69,00	69,52	70,00	70,55	71,05
Maluku	70,38	70,96	71,42	71,87	72,42
Papua	64,00	64,53	64,94	65,36	65,86

Sumber: Statistik Indonesia

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008-2012 menduduki peringkat pertama dalam hal capaian pembangunan manusia sebesar 77,03% sampai 78,33%, hal tersebut sejalan dengan capaian tingkat pendapatan per kapita yang diterima. Peringkat kedua adalah Sulawesi Utara dengan 75,16% tahun 2008 dan sebesar 76,95 tahun 2012. Sementara provinsi dengan IPM terendah adalah Papua dan Nusa Tenggara Barat. Papua sebesar 64,00% tahun 2008 dan 2012 sebesar 65,86%, sedangkan Nusa Tenggara Barat tahun 2008 dan 2012 adalah 64,12% dan 66,89%.

Konvergensi antar negara di dunia masih menjadi perdebatan oleh para ahli ekonomi yang menjelaskan bahwa konvergensi tidak akan pernah terjadi atau cenderung menuju ke kondisi divergensi (*divergent*). Beberapa penelitian tentang divergensi dilakukan oleh para peneliti seperti Romer (1986), Rebelo (1991), Pritchett (1995), Foulkes (2002) dan Das (2013) menyebutkan bahwa kesempatan bagi negara-negara kaya dan negara berkembang menuju ke kondisi konvergensi tidak ada. Hal tersebut didasarkan bahwa tingkat perekonomian seluruh negara-negara berbeda dan cenderung divergent, kesenjangan pendapatan antar negara cenderung meningkat dan kemajuan ekonomi yang dialami oleh negara-negara maju tidak serta merta dapat diterapkan di negara berkembang karena

karakteristik sosial-ekonomi di negara-negara berkembang sangat berbeda dengan negara-negara maju.

Berdasarkan uraian permasalahan dan perdebatan para ahli ekonomi tentang konsep konvergensi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang konvergensi di Indonesia dengan alasan bahwa pergantian sistem pemerintahan akan mengakibatkan ketimpangan antar provinsi mengalami penurunan atau terjadi kondisi sebaliknya. Sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Konvergensi Antar Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 menjadikan pembangunan daerah tidak lagi menjadi urusan yang diatur oleh pemerintah pusat semata, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dimulai dari proses perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang didasarkan pembagian hak dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pembagian hak dan wewenang tersebut diharapkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, politik dan keamanan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien serta dapat dijangkau oleh masyarakat umum utamanya bagi kelompok terpencil dan miskin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012 mengindikasikan terjadinya konvergensi antar provinsi di Indonesia?

2. Berapa besar kecepatan konvergensi yang dihasilkan setiap tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012?
3. Berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah, penanaman modal asing dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan PDRB per kapita seluruh provinsi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tingkat konvergensi antar provinsi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi periode tahun 2001-2012.
2. Menganalisis kecepatan konvergensi setiap tahun di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah periode tahun 2001-2012.
3. Menganalisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah untuk daerah (Gi), serta indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan PDRB per kapita seluruh provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. **Teoritis**
 - a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang konvergensi di Indonesia
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti permasalahan sejenis dengan penelitian ini
2. **Praktis**

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bahan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi memiliki tiga dasar yang menjadi asas dalam hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah yaitu:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejatinya telah diamanahkan dalam pasal 18 UUD Tahun 1945 namun baru dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. UU tersebut menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam hal wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (Pasal 2 UU No 32 Tahun 2004:8). Berikut adalah penjelasan tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat menurut UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Meskipun pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah, terdapat wewenang yang tidak dapat dilimpahkan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal (pasal 10 UU No 32 Tahun 2004:13).

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 adalah Gubernur, Bupati atau Walikota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

bersama dengan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki wewenang yang telah diatur dalam pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 yaitu :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah. Rencana kerja tersebut dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (pasal 23 UU No. 32 Tahun 2004:24).

2.2 Konvergensi

Istilah konvergensi pertama kali diperkenalkan oleh Solow pada tahun 1956 dan dipopulerkan oleh Barro (1989), Mankiw (1992) dan Barro dan Sala-I-Martin (1993, 1995, 1999, 2004). Pengertian konvergensi menurut beberapa penelitian sebelumnya seperti Barro dan Sala-I-Martin (1993,1995), Garcia dan

Soelistianingsih (1998), Lumir Kalhanek (2012) yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan antar negara cenderung mengalami penurunan setiap waktu (*sigma convergence*) dan terjadinya tendensi bahwa negara-negara miskin mengalami tingkat pertumbuhan yang cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju (*beta convergence*).

Konvergensi sigma diukur menggunakan ukuran dispersi yaitu standar deviasi dari nilai logaritma variabel pendapatan per kapita. Barro dan Sala-I-Martin (1995) menyatakan bahwa model pertumbuhan klasik memperkirakan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita cenderung bergerak ke tingkat pendapatan per kapita awal atau dengan kata lain bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan seperti daur hidup suatu produk *life cycle of product*. Sedangkan konvergensi beta mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konvergensi. Konvergensi beta menyatakan bahwa negara-negara miskin memiliki tingkat pertumbuhan tinggi daripada negara-negara maju, hal tersebut terjadi saat kondisi perekonomian mengalami masa pendewasaan yaitu terjadi pemerataan pendapatan atau perekonomian bergerak ke kondisi *steady state* (Kalhanek, 2012:2).

Konvergensi beta berkaitan dengan teori pertumbuhan neo-klasik yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengalami proses kelambatan karena adanya *law of deminishing return*. Sehingga proses pertumbuhan akan mengarah ke kondisi keseimbangan jangka panjang (*long run steady-state*). Hal tersebut diasumsikan terjadi di negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi sehingga tingkat pendapatan di negara tersebut tidak akan

meningkat lagi karena tambahan investasi tidak dapat menambah pendapatan. Penghitungan konvergensi beta dilakukan berdasarkan dua pengukuran yaitu konvergensi absolut (*absolute convergence*) dan konvergensi kondisional (*conditional convergence*).

Penghitungan konvergensi beta (*beta convergence*) didasarkan atas persamaan yang dikembangkan oleh Barro (1990) dalam Barro dan Sala-I-Martin (1991:108) sebagai berikut:

$$(1/T) \cdot \log(y_{it}/y_{i,t-T}) = x_i^* + \log(\hat{y}_i^* / \hat{y}_{i,t-T}) \cdot (1 - e^{-\beta T})/T + u_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana i adalah ekonomi suatu daerah, t adalah waktu, y_{it} adalah pendapatan per kapita, x_i^* adalah tingkat pertumbuhan dalam kondisi *steady state*, \hat{y}_i adalah output per pekerja efektif, \hat{y}_i^* adalah level output per pekerja efektif dalam kondisi *steady state*, T adalah panjangnya interval observasi, koefisien β adalah tingkat konvergensi, u_{it} adalah *error term*.

Konvergensi absolut (*absolute convergence*) dihitung dengan menggunakan analisis model ekonometrika yang mana log PDRB per kapita awal hanya sebagai variabel penjelas bagi log PDRB per kapita. Sementara konvergensi kondisional dihitung dengan menggunakan analisis ekonometrika yang mana log PDRB per kapita awal sebagai variabel penjelas bagi log PDRB per kapita ditambah dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam menganalisis tingkat konvergensi, koefisien regresi β harus bertanda negatif (-), hal tersebut didasarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan mengalami penurunan atau mengarah ke kondisi

steady state. Akan tetapi hal tersebut terdapat pengecualian kalau tingkat *steady state* antar negara-negara atau wilayah identik dalam satu kesatuan, sehingga koefisien β bertanda positif (+) tidak berimplikasi kalau dispersi pendapatan per kapita antar daerah Y_{it} menurun tiap waktu. Tanda positif cenderung mengarah kepada penurunan dispersi dari $\log(y_{it})$ dalam penghitungan konvergensi sigma atau negara-negara atau daerah-daerah miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara atau daerah-daerah maju (Barro and Sala-I-Martin, 1991:112). Sehingga antara konvergensi sigma (σ convergence) dan konvergensi beta (β convergence) saling berkaitan sama lain, apabila tidak terjadi konvergensi sigma (σ convergence) yang ditunjukkan dengan penurunan dispersi dari standar deviasi $\log(y_{it})$ maka konvergensi beta (β convergence) tidak terjadi.

2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

PDRB per kapita adalah besaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk dapat memperoleh besaran pendapatan domestik regional per kapita haruslah terlebih dahulu dihitung melalui pendapatan domestik regional bruto.

Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan output (nilai tambah) dalam waktu tertentu. Output yang dihasilkan memasukkan hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berdomisili di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Untuk menghitung besaran pendapatan nasional maupun pendapatan regional,

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

1. Pendekatan Pendapatan

Penghitungan dengan metode ini dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh dari semua pelaku ekonomi dari kegiatan ekonominya di suatu wilayah negara atau daerah. Pendapatan tersebut diperoleh dari faktor produksi yang digunakan seperti tanah, tenaga kerja, gedung, modal dan keahlian wirausaha (Prasetyo, 2009: 34). Rumus penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan sebagai berikut.

$$PN = R + W + I + P + (s-t) + Nfp \dots\dots\dots(2)$$

PN = Pendapatan Nasional

R = Rent (jumlah sewa yang diterima oleh seluruh faktor produksi)

W = Wages (jumlah gaji yang diperoleh)

I = Interest (jumlah tingkat bunga yang diterima oleh pemilik modal)

P = Profit (keuntungan yang diterima oleh pengusaha)

(s-t) = subsidi dan pajak tak langsung

Nfp = Pembayaran faktor produksi bersih dari luar negeri

2. Pendekatan Produksi

Pendapatan dengan metode ini dihitung berdasarkan keseluruhan nilai akhir (*final goods*) dari output yang dihasilkan oleh semua sektor-sektor di wilayah suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Sektor-sektor yang dihitung dengan pendekatan ini meliputi sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Konstruksi; Perdagangan,

Restoran, dan Hotel; Pengangkutan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa-jasa. Penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$PN = P_1Q_1 + \dots + P_nQ_n \dots\dots\dots(3)$$

PN = Pendapatan Nasional

P = Price (harga)

Q = Quantity (jumlah produk yang dihasilkan)

3. Pendekatan Pengeluaran

Penghitungan dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung seluruh komponen pengeluaran yang dirinci menurut komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba), pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan impor (BPS, 2014). Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini digunakan rumus seperti berikut:

$$PN = C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots(4)$$

PN = Pendapatan Nasional

C = Consumption (Pengeluaran masyarakat)

I = Investasi (Pengeluaran perusahaan)

G = Government (Pengeluaran pemerintah)

(X - M) = Ekspor Bersih

2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung.

Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Pengertian penanaman modal asing menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan pemodal dalam negeri. Berdasarkan undang-undang tersebut, penanaman modal asing dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal asing di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, terdapat dua teori yang mendasari hal tersebut yaitu teori pertumbuhan eksogen dan endogen. Teori pertumbuhan eksogen menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan investasi modal yang tinggi. Dalam jangka panjang, pertumbuhan hanya akan dapat meningkat melalui faktor teknologi, akumulasi modal dan pembangunan manusia. Sedangkan teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi akan meningkat karena adanya faktor-faktor dari dalam. Dalam jangka panjang, pertumbuhan akan dapat dicapai melalui faktor pembangunan manusia, pengetahuan, produksi dan inovasi dalam negeri. Selain kedua teori tersebut, terdapat beberapa ahli yang menjelaskan teori terjadinya investasi asing sebagai berikut.

1. Teori R. Vernon

Menurut Vernon (1996) menjelaskan tentang penanaman modal asing dengan Model Siklus Produk atau *The Product Cycle Theory* (Anoraga, 1995:53). Model tersebut menjelaskan setiap teknologi atau produksi dikembangkan melalui tiga tahap yaitu tahap permulaan atau inovasi, kedua tahap perkembangan proses dan ketiga adalah tahap pematangan atau standarisasi. Pada tahap pertama perusahaan-perusahaan maju di Amerika Serikat menikmati posisi monopoli karena kemampuan teknologinya belum tersaingi. Tahap kedua, perusahaan mulai memikirkan ekspansi pasar ke luar negeri guna meningkatkan ekspor dan tempat pasar baru melalui aliran dana asing. Tahap ketiga, standarisasi proses pengolahan yang memungkinkan pengalihan lokasi produksi ke negara-negara berkembang utamanya negara-negara industri baru (*Newly Industrializing Countries*) yang memiliki tingkat upah yang rendah.

2. Teori John Dunning

John Dunning (1997) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori ancangan elektris (Anoraga, 1995:57). Teori ini menetapkan tiga langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk berkecimpung dalam penanaman modal asing. Tahap pertama adalah adanya keunggulan spesifik perusahaan yang meliputi:

- a. Teknologi yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan.
- b. Keterampilan manajerial.
- c. Differensiasi produk.
- d. Ukuran besar yang mencerminkan skala ekonomi.

Tahap kedua adalah internalisasi perusahaan. Kondisi yang mendukung adanya internalisasi adalah:

- a. Biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak.
- b. Ketidakpastian pembeli tentang teknologi yang dijual.
- c. Kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk.
- d. Keunggulan untuk menggunakan deskriminasi harga atau subsidi ulang (*cross subsidization*).

Tahap ketiga adalah keunggulan spesifik negara. Keunggulan spesifik lokasi negara tuan rumah meliputi:

- a. Sumber daya alam.
 - b. Tenaga kerja yang rendah dan efisien.
 - c. Hambatan perdagangan tentang pembatasan impor.
3. Teori David K. Eiteman

Menurut David K. Eiteman (1989), motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga yaitu motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi (Anoraga, 1995: 60). Motif strategis dikategorikan kedalam motif mencari pasar, bahan baku, efisiensi produksi, pengetahuan dan keamanan politik. Sementara motif perilaku merupakan rangsangan eksternal dari organisasi yang didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Sementara motif ekonomi didasarkan pada motif mencari keuntungan yang maksimal dalam jangka panjang dan harga pasar perusahaan.

2.5 Pengeluaran Pemerintah Untuk Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai aktif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 mengharuskan pemerintah untuk memberikan perimbangan keuangan kepada tiap-tiap daerah untuk melaksanakan kegiatan desentralisasi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004:4). Dana perimbangan terdiri dari tiga kategori yaitu:

2.5.1 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004:4). Dana bagi hasil bersumber dari pajak yang terdiri PBB, BPHTB dan PPh, sementara dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.5.2 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004:4). Berdasarkan pengertian tersebut,

adanya DAU diharapkan daerah yang masih tertinggal mendapat tambahan pendapatan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN dan penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk formulasi penetapan besaran DAU ditentukan melalui:

1. Formula DAU

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal dan Alokasi Dasar. Celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus formula DAU adalah sebagai berikut :

$$DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)} \dots\dots\dots(5)$$

Dimana:

AD = gaji PNS

CF = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal

2. Variabel DAU

Kebutuhan fiskal yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Kapasitas fiskal yang merupakan sumber pendanaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3. Metode Penghitungan DAU

Alokasi Dasar (AD)

Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji PNSD tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

Celah Fiskal (CF)

Dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF, sebagai berikut:

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (a_1\text{IP} + a_2\text{IW} + a_3\text{IPM} + a_4\text{IKK} + a_5\text{IPDRB}) \dots\dots\dots(6)$$

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

a = Bobot Indeks

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB = Indeks Pendapatan Domestik Regional Bruto

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH pajak} + \text{DBH SDA} \dots\dots\dots(7)$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumber Daya Alam

2.5.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No 33 Tahun 2004:4). Program-program yang dapat didanai berdasarkan dana alokasi khusus meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan dan perdagangan.

Pemberian DAK oleh Pemerintah kepada Daerah ditetapkan berdasarkan tiga kriteria, kriteria tersebut meliputi kriteria umum, khusus dan teknis. Penjelasan dari ketiga kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
2. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

3. Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/departemen teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan DAK di daerah.

2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal penting yang diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak. Untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia yang representatif maka dapat dihitung melalui *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator pembangunan manusia yang dihitung melalui IPM terdiri dari tiga dimensi yang meliputi: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Angka IPM ini berkisar dari 0 sampai 100, semakin mendekati 100 maka tingkat pembangunan manusia yang semakin bagus. Untuk menghitung IPM dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut (UNDP, 2004)

$$IPM = \frac{1}{3} (Y_1 + Y_2 + Y_3) \dots\dots\dots(8)$$

Dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Y_1 = Indeks Harapan Hidup

Y_2 = Indeks Pendidikan

Y_3 = Indeks Standar Hidup Layak

Indeks pembangunan manusia ini merupakan salah satu instrumen yang dapat mewakili dari tujuan pembangunan manusia sehingga dapat mengetahui capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, karena input produksi yaitu manusia yang terserap dalam faktor produksi memiliki tingkat kreativitas dan produktivitas yang dapat menghasilkan output berkualitas dan berdaya saing.

2.7 Penelitian Terdahulu

Garcia dan Soelistianingsih (1993) melakukan penelitian tentang perbedaan pendapatan per kapita seluruh provinsi di Indonesia periode tahun 1975-1993 dengan menggunakan regresi *cross section* untuk mengetahui tingkat kovergensi sigma dan konvergensi beta. Model konvergensi absolut sebagai berikut:

$$\ln(y_t/y_0)/t = a + b \ln(y_0) \dots\dots\dots(9)$$

Dimana \ln adalah logaritma linear, y_t adalah pendapatan per kapita pada tahun t , y_0 adalah pendapatan per kapita awal. Sedangkan model konvergensi kondisional adalah sebagai berikut:

$$\ln(y_t/y_0)/t = a + b \ln(y_0) + \sum_j y_j Z_j \dots\dots\dots(10)$$

Dimana Z_j adalah variabel-variabel lain seperti pendidikan, kelahiran dan sumber daya alam yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya adalah terjadi konvergensi sigma maupun konvergensi beta mulai tahun 1975-1993. Pendidikan dan sumber daya alam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, sementara tingkat kelahiran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita.

Lant Pritchett (1996) melakukan penelitian tentang indikasi adanya divergensi dengan judul "*Forget Convergence: Divergent Past, Present, and Future*" di seluruh negara-negara di dunia periode tahun 1880-1990. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pendapatan antara negara-negara dengan penghasilan tinggi dan rendah akan terus-menerus terjadi sehingga kesempatan untuk terjadinya konvergensi tidak ada. Hal tersebut didasarkan asumsi bahwa kesenjangan pendapatan tidak akan pernah hilang.

Wibisono (2003) melakukan penelitian tentang konvergensi di Indonesia dari tahun 1975 – 2000 dengan menggunakan analisis data panel dengan metode estimasi 3-SLS (*Three-Stage Least Square*), GLS dengan *Cross Section Weight* dan *Fixed Effect*. Untuk menguji konvergensi absolut digunakan persamaan

$$\log (y_{it} / y_{i0}) / T = a - b \log (y_{i0}) \dots\dots\dots(11)$$

dimana *subscript i* menandakan daerah, *subscript 0* dan T menandakan interval observasi pada dua titik waktu, serta y_{it} dan y_{i0} menunjukkan tingkat pendapatan awal dan akhir. Hipotesis dari model neoklasik terdapat hubungan negatif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan kondisi awal pendapatan per

kapita. Sedangkan untuk melakukan tes *conditional convergence*, digunakan persamaan sebagai berikut,

$$\log (y_{it} / y_{i0}) / T = a - b \log (y_{i0}) + c \log (h_{i0}) + \dots \dots \dots (12)$$

subscript h_{i0} menunjukkan kondisi awal dari *state variables* seperti *stock of physical capital* dan *stock of human capital*. Stok modal dan stok mutu manusia merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara tanda titik-titik menunjukkan variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti *fertility rate*, *terms of trade*, migrasi dan inflasi regional.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah terjadi konvergensi sigma yang dilihat dari penurunan dispersi log pendapatan, sedangkan beta konvergensi juga mengkonfirmasi terjadinya konvergensi dengan kecepatan konvergensi ke lima periode berturut adalah 2.19%, 2.60%, 1.55%, 1.90% dan 1.02% per tahun.

Aritenang (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pengalihan anggaran pemerintah terhadap ketimpangan regional di Indonesia serta menguji terjadi atau tidaknya konvergensi: sebelum dan dan sesudah otonomi daerah periode tahun 1993-2005 dengan menggunakan analisis regresi data panel *fixed effect*. Model konvergensi absolut adalah:

$$\Delta Y_{it} = \alpha - \beta Y_{it-1} \dots \dots \dots (13)$$

Dimana ΔY_{it} adalah logaritma natural pertumbuhan pdrb per kapita tiap-tiap provinsi, sedangkan Y_{it-1} adalah logaritma natural pertumbuhan pdrb per kapita tahun sebelumnya tiap-tiap provinsi. Sedangkan model konvergensi kondisional adalah:

$$\Delta Y_{it} = \alpha - \beta Y_{it-1} + \alpha_2 \Delta I_{it} + \alpha_3 \Delta Z_{it} + \alpha_4 \Delta D_{it} + \varepsilon \dots\dots\dots(14)$$

Dimana ΔY_{it} adalah logaritman natural pertumbuhan pdrb per kapita tiap-tiap provinsi, sedangkan Y_{it-1} adalah logaritma natural pertumbuhan pdrb per kapita tahun sebelumnya tiap-tiap provinsi, I_{it} adalah tingkat populasi, Z_{it} adalah variabel desentralisasi fiskal dan D_{it} adalah jarak tiap-tiap provinsi terhadap kota Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan.

Hasilnya adalah terjadi konvergensi sigma dan beta yang terjadi selama periode tahun 1995-2005 di 26 provinsi Indonesia. Pada tahun 1993-1998 masa sebelum krisis tingkat konvergensi sebesar 68 persen per tahun. Sementara pasca krisis tahun 1998-2005 konvergensi masih terjadi dengan kecepatan 9,6 persen per tahun. Variabel populasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel desentralisasi berpengaruh positif terhadap konvergensi. Variabel-variabel seperti tingkat pendidikan, angka harapan hidup, perubahan *term of trade* (TOT) memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah. Sementara tingkat fertilitas, migrasi, konsumsi pemerintah daerah yang tidak memperbaiki produktivitas dan inflasi regional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian daerah.

Rahman (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh investasi pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan PDRB per kapita Indonesia dengan studi kasus konvergensi sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah tahun 1990-2010. Penelitian tersebut dihitung dengan menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari 26 provinsi. Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung konvergensi absolut adalah

$$\log YC_{it} = \alpha + \beta_1 \log YC_{(it-1)} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (15)$$

Sementara persamaan konvergensi kondisional adalah

$$\log YC_{it} = \alpha + \beta_1 \log YC_{(it-1)} + \beta_2 GI_{it} + \beta_3 PI + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (16)$$

dimana YC_{it} adalah PDRB per kapita setiap provinsi, $YC_{(it-1)}$ adalah PDRB per kapita setiap provinsi tahun sebelumnya, GI adalah pengeluaran investasi pemerintah daerah, PI adalah investasi swasta. Hasilnya adalah terjadi konvergensi sebelum dan sesudah otonomi. Kecepatan konvergensi absolut dan kondisional sebelum otonomi daerah sebesar 5,69% dan 4,38%. Sementara setelah otonomi daerah kecepatan konvergensi absolut dan kondisional sebesar 6,45% dan 4,61%. Sedangkan pengeluaran investasi daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita setiap provinsi dan investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita setiap provinsi.

Samarjit Das, Chetan Ghate dan Peter E. Robertson (2013) melakukan penelitian tentang divergensi dengan judul “*Remoteness and Unbalanced Growth: Understanding Divergence Across Indian District*” periode tahun 2001-2011 dengan hasil penelitian adalah tidak terjadinya konvergensi atau terjadi divergensi antar provinsi di India.

Shioji (2001) melakukan penelitian tentang pengaruh modal publik (*public capital*) seperti pendidikan, perumahan, jalan raya, pelabuhan, bandara, pembuangan sampah, konservasi taman nasional, pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi: studi kasus pendekatan konvergensi di Jepang dan Amerika Serikat periode tahun 1960-1988. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa modal publik (*public capital*) tidak hanya memiliki pengaruh

langsung yang dapat meningkatkan output per kapita semata, tetapi juga memiliki pengaruh yang tidak langsung yaitu berkontribusi terhadap berlangsungnya tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*sustainable of economic growth*) melalui akumulasi modal swasta.

Syed Tehseen Jawaid and Syed Ali Raza (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh penanaman modal asing (PMA), pertumbuhan dalam hipotesis konvergensi di 129 negara yang dibagi menjadi negara dengan pendapatan rendah, menengah dan tinggi. Hasilnya adalah penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pendapatan ekonomi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah.

Tiwari dan Mutascu (2011) menjelaskan pengaruh penanaman modal asing (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi 26 negara asia dengan menggunakan pendekatan data panel periode tahun 1986-2008. Hasilnya adalah penanaman modal asing (FDI) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka menyarankan kepada para pembuat kebijakan untuk mendukung masuknya penanaman modal asing (FDI) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terhadulu

Peneliti	Data dan Sampel	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Garcia dan Soelistianingsih (1993)	Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 1975-1993	PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan per kapita tahun sebelumnya - Pendidikan - Kelahiran - SDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi konvergensi di Indonesia tahun 1975-1993 - Pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

				<ul style="list-style-type: none"> - Kelahiran berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi - SDA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Lant Pritchett (1996)	Seluruh negara-negara di dunia	GDP antar negara di dunia		Terjadinya divergensi di seluruh dunia tahun 1870-1990
Wibisono (2003)	Seluruh provinsi di Indonesia tahun 1975-2000	PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan per kapita awal - <i>Physical capital</i> - <i>Stock of human capital</i> - <i>Fertility rate</i> - <i>Terms of trade</i> - <i>Migrasi</i> - <i>Inflasi daerah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi konvergensi di Indonesia tahun 1975-2000 - Tingkat pendidikan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan - AHH berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi - Tingkat fertilitas berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi - TOT memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah - Inflasi memiliki dampak negatif

				terhadap perekonomian
Aritenang (2009)	26 provinsi di Indonesia tahun 1993-2005	PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan per kapita tahun sebelumnya - Populasi - Variabel desentralisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi konvergensi di Indonesia tahun 1993-2005 - Populasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi - Variabel desentralisasi berpengaruh positif
Rahman (2012)	26 provinsi di Indonesia	PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran investasi daerah - Investasi swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Konvergensi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah - Investasi daerah dan swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita
Samarjit Das, Chetan Gate dan Peter E. Robertson	India	PDB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak - Urbanisasi - Listrik - Jumlah Bank komersial - 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya divergensi antar provinsi di India - Jarak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi - Urbanisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi - Jumlah bank komersial
Shioji (2001)	Amerika Serikat dan Jepang	<i>Public capital</i>	Pertumbuhan ekonomi	<i>Public capital</i> tidak hanya berpengaruh

				secara langsung untuk meningkatkan output per kapita tetapi memiliki dampak tidak langsung yaitu menjaga tingkat pertumbuhan secara berkelanjutan dan dapat mengakumulasi modal swasta
Syed Tehseen Jawaid and Syed Ali Raza (2012)	126 negara	Penanaman modal asing (PMA)	Pertumbuhan ekonomi	PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah, sementara untuk negara yang berpendapatan tinggi, PMA tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Tiwari dan Mutascu (2011)	26 negara-negara Asia	Penanaman modal asing (PMA)	Pertumbuhan ekonomi	PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 26 negara-negara Asia

2.8 Hubungan Antar Variabel

2.8.1 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan PDRB per kapita

Investasi asing merupakan sumber daya modal alternatif bagi negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya modal terbatas. Dengan

tambahan modal yang dimiliki, negara-negara berkembang termasuk Indonesia dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru yang diikuti dengan terserapnya tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, proses produksi lebih efisien karena menggunakan teknologi dan manajemen produksi baru yang lebih efisien, transfer ilmu dan kemampuan yang dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan output per kapita lebih tanpa mengurangi mutu dan kualitas barang tersebut.

Penanaman modal asing (PMA) yang terdapat di suatu negara, selain menciptakan manajemen produksi yang lebih efisien, transfer pengetahuan dan teknologi, juga membawa kompetisi di pasar dalam negeri yang menuntut bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas barang, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan inovasi produk untuk dapat menarik perhatian konsumen dan memperluas pasar. Sehingga konsumen akan diuntungkan karena adanya tingkat persaingan antar produsen menyebabkan barang-barang yang tersedia di pasar terjamin mutu dan kualitasnya. Berdasarkan hal tersebut penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita seluruh provinsi.

2.8.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Untuk Daerah (Gi) dengan PDRB per kapita

Pengeluaran pemerintah untuk daerah dalam penelitian adalah dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dan bagi hasil

pengelolaan pajak dan sumber daya alam. Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah memiliki sumber daya modal yang lebih selain yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang dihasilkan berdasarkan perbaikan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian, perikanan dan sebagainya.

Transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan nasional didasarkan atas prinsip *bottom-up planning*, yang berarti bahwa pembangunan di tingkat daerah dirumuskan oleh masing-masing daerah yang didasarkan atas permasalahan-permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang terencana dan terarah berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Sementara pemerintah pusat bertindak sebagai pengawas dan pemberi alokasi anggaran untuk melaksanakan program-program pembangunan di tingkat daerah. Dengan demikian pengeluaran pemerintah untuk daerah berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita seluruh provinsi.

2.8.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan PDRB per kapita

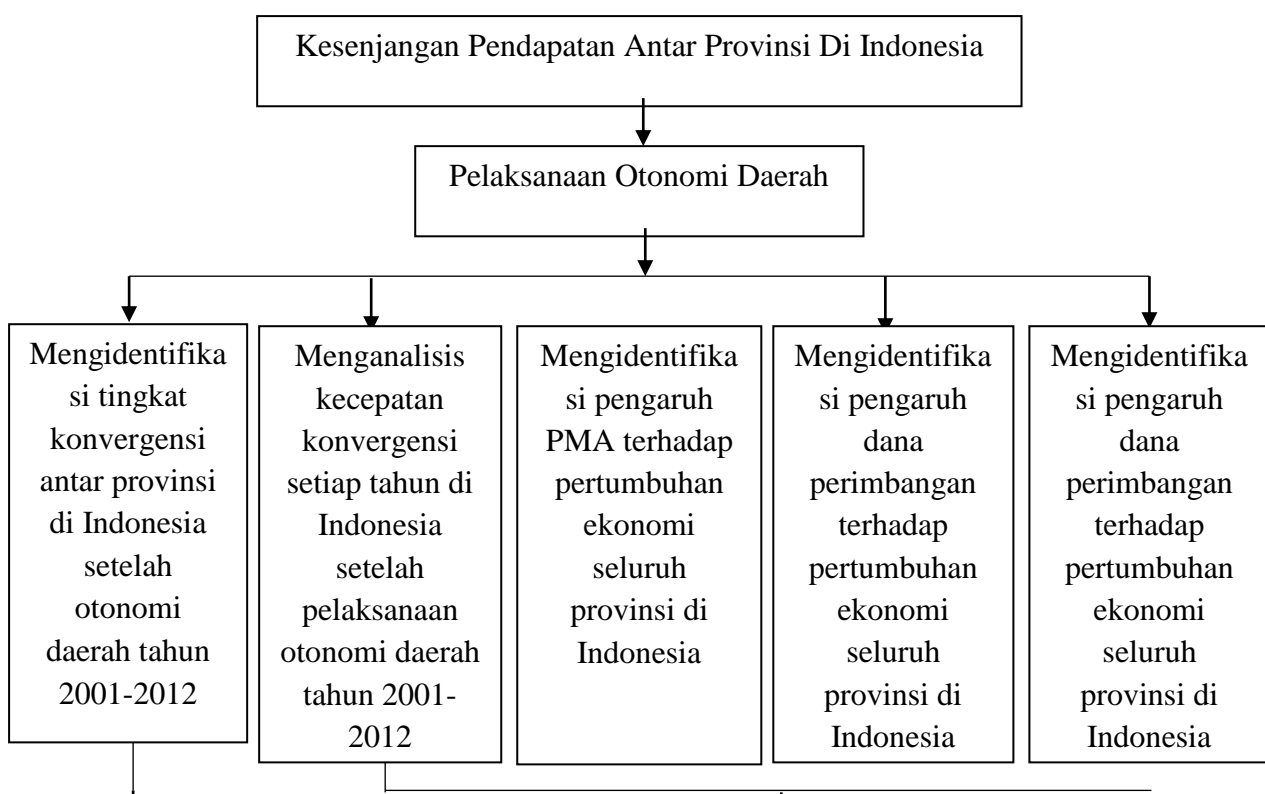
Indek pembangunan manusia menekankan bahwa pembangunan berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia pada tujuan akhir pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Dengan penekanan tersebut, pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia semakin banyak, diantaranya yang paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, berilmu dan berpengetahuan luas serta mempunyai akses terhadap sumber daya agar dapat hidup layak dan

sejahtera. Penggunaan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian ini didasarkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu instrumen yang dapat mewakili arti pentingnya capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dalam proses meningkatkan pendapatan per kapita suatu wilayah.

Pentingnya kualitas sumber daya manusia dijelaskan oleh Solow yang menganggap bahwa dalam proses produksi faktor yang dominan bukan lagi sumber daya modal, akan tetapi harus memasukkan kualitas sumber daya manusia dan faktor teknologi modern. Untuk dapat mengkombinasikan faktor-faktor produksi (K, L, R, T) maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat menciptakan proses produksi yang lebih efisien melalui penguasaan teknologi modern, sehingga dapat menciptakan produk yang inovatif dan berdaya saing. Berdasarkan hal tersebut, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan kajian teori dan analisis penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008:731) adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel atau *pool data*. Data panel adalah data kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*) yang terdiri dari 26 provinsi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 - 2012.

Pada masa setelah otonomi daerah, terjadi fenomena pemekaran wilayah yang menyebabkan terbentuknya provinsi-provinsi baru seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat. Akan tetapi, provinsi-provinsi baru tersebut dalam penelitian ini tidak dimasukkan karena provinsi-provinsi tersebut masih membutuhkan waktu untuk berkembang apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang telah lama terbentuk.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu: variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita seluruh provinsi di Indonesia atas dasar harga konstan (ADHK) 2000.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel bebas adalah variabel penjelas dari variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita awal atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah untuk daerah (GI) dalam hal ini adalah dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia (IPM).

3.2.3 Variabel Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita awal, pengeluaran pemerintah untuk daerah (Gi), penanaman modal asing (PMA) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Berikut definisi operasional variabel pada penelitian ini:

1. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, variabel ini mencerminkan tingkat pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di seluruh provinsi berdasarkan atas harga-harga tahun 2000 yang diukur dengan satuan rupiah.

2. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita awal atas dasar harga konstan (ADHK) 2000. Variable ini mencerminkan tingkat pendapatan awal yang diterima oleh setiap penduduk di seluruh provinsi berdasarkan atas harga-harga tahun 2000 yang diukur dengan satuan rupiah.
3. Penanaman modal asing (PMA), variabel ini mencerminkan besaran investasi asing yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang diukur dengan satuan dolar.
4. Pengeluaran pemerintah untuk daerah (Gi) khusus dalam penelitian ini adalah dana perimbangan yang diterima oleh seluruh provinsi di Indonesia. Variabel ini mencerminkan tingkat penerimaan pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang didasarkan atas pelaksanaan otonomi daerah serta bagi hasil atas sumber daya alam dan pajak yang diukur dengan satuan rupiah.
5. Indeks pembangunan manusia (IPM), variabel ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian melalui peningkatan produksi yang lebih efisien dan memiliki daya saing. Indeks ini diukur dengan satuan persen.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti teliti (Sekaran, 2006:241). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang sampai tahun 2012 berjumlah 33 provinsi. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya digunakan 26 provinsi karena setelah

pelaksanaan otonomi daerah terdapat provinsi-provinsi baru hasil pemekaran wilayah yang diasumsikan masih harus berkembang apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang sudah lama terbentuk.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan Statistik Indonesia dan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi (i) pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita setiap provinsi atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 tahun 2001-2012, (ii) pengeluaran pemerintah untuk daerah (Gi) dalam penelitian ini adalah dana perimbangan seluruh provinsi tahun 2001-2012, (iii) penanaman modal asing (PMA) setiap provinsi tahun 2001–2012, (iv) indeks pembangunan manusia (IPM) setiap provinsi tahun 2001-2012.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menggunakan analisis regresi panel. Menurut Gujarati (2012:237) terdapat beberapa keunggulan dengan menggunakan data panel yaitu:

1. Data panel yang berasal dari data gabungan antara data runtut waktu dan silang tempat memberi lebih informasi, lebih banyak variasi, lebih banyak efisiensi, lebih banyak *degree of freedom* dan sedikit kolinearitas antar variabel.
2. Oleh karena data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian dari waktu ke waktu terdapat batasan heterogenitas dalam setiap

unit tersebut. Dengan teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas tersebut.

3. Dengan mempelajari observasi silang tempat (*cross section*) yang berulang-ulang, data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
4. Data panel dapat meminimumkan bias apabila kita mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan dalam agregasi besar.
5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.
6. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data silang tempat (*cross section*) dan runtut waktu (*time series*).

Menurut Gujarati (2003:637) dan Baltagi (2005:5) dalam Rahman (2012:46), data panel tidak membutuhkan untuk dilakukan uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas. Hal tersebut didasarkan bahwa data panel memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a) Parameter regresi tidak berubah dari waktu ke waktu
- b) *Variance error* dari fungsi regresi adalah homoskedastik
- c) *Error* fungsi regresi dari waktu ke waktu tidak berhubungan

3.6 Pengujian Model

Dalam menggunakan regresi data panel, setidaknya terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Pendekatan *common effect* adalah estimasi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section* dengan mengasumsikan bahwa intersep maupun slope adalah sama baik

antar waktu maupun antar individu. Asumsi ini sangat jelas berbeda dari realita yang sebenarnya, karena karakteristik antar objek dengan yang lain jelas berbeda (Widarjono, 2007:231).

Salah satu cara untuk mengetahui perbedaan antar intersep maupun koefisien regresi (slope) dengan mengasumsikan bahwa intersep antar objek berbeda sedangkan koefisien regresi tetap. Teknik ini dikenal dengan model *fixed effect*. Pengertian *fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar objek namun intersepanya sama antar waktu (*time invariant*). Model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar objek dan antar waktu (Widarjono, 2007:233).

Penggunaan variabel dummy di dalam model *fixed effect* membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan variabel gangguan (*error term*) yang dikenal dengan metode *random effect*. Untuk memilih model regresi yang tepat dari ketiga teknik tersebut, maka harus dilakukan pengujian yaitu uji F dan Uji Hausman. Adapun pengujian F statistik dan Hausman didasarkan pada langkah berikut ini:

1) Uji F (*Chow Test*)

Uji ini berfungsi untuk menentukan apakah model yang digunakan *pooled least square* atau *fixed effect*. Dalam pengujian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{pooled least square}$$

$$H_1 = \text{fixed effect model}$$

Menolak H_0 apabila apabila nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Dengan demikian model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2) Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang digunakan. Dalam pengujian ini hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$H_0 = \text{random effect model}$

$H_1 = \text{fixed effect model}$

Menolak H_0 apabila nilai *chi-square* > *chi square table* maka model yang dipilih adalah *fixed effect*.

Gujarati (2012:255) menjelaskan mengenai pemilihan antara FEM dan REM yang didasarkan atas hasil dari observasi Judge sebagai berikut:

1. Jika T (jumlah time-series) adalah besar dan N (jumlah unit *cross-section*) adalah kecil, kemungkinan akan sedikit perbedaan nilai parameter yang diestimasi oleh FEM dan REM. Oleh karena itu, pemilihannya berdasarkan kenyamanan perhitungan saja.
2. Ketika N besar dan T kecil (panel yang pendek), hasil estimasi yang diperoleh dari kedua metode bisa berbeda signifikan. Dalam REM $\beta_{li} = \beta_1 + \varepsilon_i$, dimana ε_i adalah komponen secara acak, yang mana di dalam FEM menganggap β_{li} sebagai nilai tetap dan tidak acak. Apabila pengambilan sampel dilakukan tidak acak maka FEM yang pantas untuk digunakan. Namun, apabila unit *cross-section* diambil secara acak maka REM yang pantas digunakan.

3. Jika komponen eror individual ε_i dan satu atau lebih variabel independen saling korelasi, maka estimator REM adalah bias, sedangkan FEM tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil, dan jika asumsi yang mendasari REM terpenuhi, maka estimator REM lebih pantas digunakan.
5. Tidak seperti FEM, REM dapat mengestimasi koefisien dari variabel yang tidak dipengaruhi waktu seperti gender dan etnisitas. FEM memang mengontrol variabel yang dipengaruhi ini, namun tidak dapat mengestimasi secara langsung.

3.7 Pengukuran Konvergensi

3.7.1 Konvergensi Sigma (*Sigma Convergence*)

Konvergensi sigma dapat diukur dengan cara menghitung dispersi pendapatan per kapita suatu negara atau daerah. Untuk menghitung dispersi didasarkan atas hasil standar deviasi dari logaritma pendapatan (PDRB) per kapita antar provinsi di Indonesia setiap tahun. Apabila nilai standar deviasi mengalami penurunan setiap waktu maka mengindikasikan terjadinya konvergensi sigma. Namun, apabila terjadi hal sebaliknya yaitu apabila nilai dari logaritma PDRB per kapita tidak mengalami penurunan setiap waktu, maka tidak menunjukkan terjadinya konvergensi sigma. Sehingga apabila tidak terjadi konvergensi sigma maka dapat disimpulkan bahwa suatu wilayah tersebut tidak terindikasi terjadinya konvergensi atau terjadi divergensi (*divergent*).

Dengan demikian, penghitungan konvergensi beta tidak dapat dilakukan karena sudah terindikasi tidak terjadi konvergensi yang didasarkan atas

penghitungan konvergensi sigma. Konvergensi sigma dan konvergensi beta merupakan suatu kesatuan, sehingga untuk mendeteksi terjadinya konvergensi di suatu wilayah diperlukan terindikasinya konvergensi sigma dan konvergensi beta.

3.7.2 Konvergensi Beta (*Beta Convergence*)

3.7.2.1 Konvergensi Absolut (*Absolute Convergence*)

Penghitungan konvergensi beta didasarkan pada model persamaan yang dikembangkan oleh Barro dan Sala-I-Martin (1990). Model persamaan tersebut menghubungkan tingkat pertumbuhan per kapita antara dua titik waktu dengan pendapatan per kapita awal. Jika kita mengasumsikan memiliki observasi pada dua titik waktu 0, dan T, maka model Barro dan Sala-I-Martin (1990) dapat dituliskan:

$$\log (y_{iT}/y_{i0}) = \alpha - [(1-e^{-\beta T})/T].\log (y_{i0}) + u_{i0,T} \dots\dots\dots (17)$$

dimana i adalah negara atau daerah, α adalah intersep, (y_{iT}/y_{i0}) adalah tingkat pertumbuhan PDB per kapita, y_{iT} dan y_{i0} adalah pendapatan per kapita awal dan akhir periode, $(1-e^{-\beta T})$ adalah koefisien pendapatan awal yang menurun seiring dengan panjangnya interval waktu. Untuk mendapatkan model konvergensi absolut maka persamaan diatas dapat ditulis kembali sebagai berikut:

$$\log (y_{it}/y_{it-1}) = \alpha + b \log (y_{it-1}) \dots\dots\dots (18)$$

Persamaan nomor 17 dari Barro dan Sala-I-Martin dapat dimodifikasi untuk menentukan model konvergensi absolut setelah pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

$$\log Y_{it} = \alpha + \beta_1 \log Y_{it-1} + e_{it} \dots\dots\dots (19)$$

dimana Y_{it} adalah PDRB per kapita tiap provinsi, Y_{it} adalah PDRB per kapita tiap provinsi awal, β adalah koefisien regresi yang dapat digunakan untuk menghitung kecepatan konvergensi dan $e_{it} = \text{error term}$

3.7.2.2 Konvergensi Kondisional (*Conditional Convergence*)

Model konvergensi kondisional setelah pelaksanaan otonomi daerah menggunakan persamaan (16) ditambah dengan variabel independen dalam penelitian ini yaitu penanaman modal asing (PMA) pengeluaran pemerintah untuk daerah (G_i) dan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi persamaan (4) berikut ini:

$$\log Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log} Y_{it-1} + \beta_2 \log \text{PMA} + \beta_3 G_{it} + \beta_4 \text{IPM}_{it} + e_{it} \dots (20)$$

dimana:

Y_{it} = PDRB per kapita provinsi

Y_{it-1} = PDRB per kapita provinsi tahun sebelumnya

Pma = Penanaman modal asing

G_i = Pengeluaran pemerintah untuk daerah

Hd = Indeks pembangunan manusia

i = daerah

t = tahun

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

e = *error term*

3.8 Kecepatan Konvergensi (*Speed of Convergence*)

Menurut Barro dan Sala-I-Martin (2004:56) kecepatan konvergensi penting untuk diketahui karena ketika terjadi konvergensi yang semakin cepat

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tahun 2001-2012, telah terjadi konvergensi sigma (*sigma convergence*) antar provinsi di seluruh Indonesia yang ditunjukkan dengan penurunan dispersi PDRB per kapita dan juga terjadi konvergensi beta (*beta convergence*) yang dihitung dengan menggunakan analisis ekonometrika.
2. Kecepatan konvergensi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012 adalah sebesar 6,3% per tahun yang didasarkan pada penghitungan konvergensi absolut (*absolute convergence*), sementara kecepatan konvergensi yang didasarkan pada konvergensi kondisional (*conditional convergence*) sebesar 5,6% per tahun.
3. Analisis konvergensi kondisional setelah pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa variabel penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah untuk daerah (Gi), dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita seluruh provinsi di Indonesia.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing dapat digunakan sebagai sumber modal alternatif untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan cara mempermudah regulasi dan perizinan serta stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
2. Pengeluaran pemerintah untuk daerah (Gi) dalam penelitian ini adalah dana perimbangan, harus dioptimalkan penggunaannya karena dapat digunakan meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, irigasi, pertanian yang dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita di tiap-tiap provinsi.
3. Program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena dapat menghasilkan produk-produk barang dan jasa yang berkualitas, berinovasi dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan PDRB per kapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramovitz, Moses. 1986. *Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind*. *Journal of Economic History* June 1986 pp. 385-405.
- Alexiadis, Stilianos and Konstantinos Eleftheriou. 2010. *The Morphology of Income Convergence in US States: New Evidence using an Error-Correction-Model*. MPRA
- Anoraga, Pandji. 1995. *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Aritenang, Adiwan F. 2009. *The Impact of Government Budget Shifts to Regional Disparities in Indonesia: Before and After Decentralisation*. MPRA.
- Badan Pusat Statistik. 1988. *Pendapatan Regional Provinsi-provinsi di Indonesia 1979-1984*. Jakarta: CV
- _____. *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Berbagai Edisi.
- _____. *Statistik Keuangan Antar Provinsi*. Badan Pusat Statistik. Berbagai Edisi.
- Barro, Robert J. 1990. *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth*. *The Journal of Political Economy*, Vol. 98 No. 5, Part 2. The University of Chicago Press.
- Barro, Robert J and Xavier Sala-I-Martin. 1991. *Convergence across State and Regions*. *Brooking Papers on Economic Activity*.
- _____. 2004. *Economic Growth Second Edition*. London. England: The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
- Basri, Faisal H. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Daniele, Vittorio. 2009. *Regional convergence and public spending in Italy. Is there a correlation?*. MPRA.
- Das. Samarjit, etc. *Remoteness and Unbalanced Growth: Understanding Divergence Across Indian Districts*. *Discussion Paper* 13.31. The University of Western Australia.
- Foulkes, David Mayer. 2002. *Global Divergence*. Centro de Investigacion y Docencia Economicas (CIDE). Division of Economics.

- Garcia, Jorge Garcia and Lana Soelistianingsih. 1997. *Why do differences in provincial incomes persist in Indonesia. Indonesia Discussion Paper Series.*
- Given, Lisa M. (editor). 2008. *The Sage encyclopedia of qualitative research methods.* Thousand Oaks: Sage.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar Dasar Ekonometrika.* Buku 1. Terjemahan Eugenia Mardanugraha dkk. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2012. *Dasar Dasar Ekonometrika.* Buku 2. Terjemahan Raden Carlos Mangunsong. Jakarta : Salemba Empat.
- Jawaid, Syed Tehseen and Syed Ali Raza. 2012. *Foreign Direct Investment, Growth and Convergence Hypothesis: A Cross Country Analysis.* MPRA
- Kalhanek, Lumir. 2012. *Real convergence in Central and Eastern European EU Member states.* MPRA.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga.
- Mahi, Raksasa. 2001. *Manajemen Keuangan Publik Pemerintahan Daerah di Era Otonomi, makalah pada Diskusi Panel “ Manajemen Keuangan Publik dan Akuntansi Sektor Publik di Era Otonomi “*, Universitas Pancasila
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima.* Terjemahan Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Prasasti, Diah. 2006. *Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi di Indonesia Periode 1993 – 2003 : Pendekatan Kesenjangan Regional dan Konvergensi.* Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia vol 21 No 6 Hal 364-360.
- Pritchett, Lant. 1996. *Forget Convergence: Divergent Past, Present, and Future.* Financial & Development of World Bank.
- Pritchett, Lant. 1997. “*Divergent, Big Time*”. Journal of Economic Perspective, 11(3):3-17. American Economic Association.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi.* Cetakan ke-1. Yogyakarta: Beta Offset.
- Rahman, Yozi Aulia. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Investasi Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita Di Indonesia (Studi Kasus Konvergensi Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah).* Tesis. Tidak Dipublikasi.

- Shioji, Etsuro. 2001. *Public Capital and Economic Growth: A Convergence Approach. Journal of Economic Growth*, 6, 205-227. Netherlands. Kluwer Academic.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordaus. 2004. *Ilmu Makroekonomi Edisi Tujuh Belas*. Terjemahan Gretta dkk. Jakarta: P.T. Global Media Edukasi.
- Tiwari, Aviral Kumar and Mihai Mutascu. 2011. *Economic Growth and FDI in Asia: A Panel-Data Approach. Economic Analysis & Policy*, Vol. 41 No. 2
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan*. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2012. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004.
- Vadlamannati, Krishna Chaitanya. 2009. *Growth effect of foreign direct investment and economic policy reforms in Latin America*. MPRA
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Wibisono, Yusuf. 2001. "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 1. No.2. Januari.

LAMPIRAN

PDRB Per Kapita Antar Provinsi (Rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan(ADHK) 2000 Tahun 2001-2012

Provinsi	2001	2002	2003	2004
Aceh	8,172,254	9,889,158	9,962,129	9,873,669
Sumatera Utara	6,098,204	6,296,246	6,609,292	6,873,420
Sumatera Barat	5,552,514	5,779,744	5,840,923	6,080,565
Riau	18,492,990	18,328,117	18,118,956	16,642,318
Jambi	4,164,936	4,293,564	4,356,169	4,553,310
Sumatera Selatan	5,955,255	6,032,978	6,989,906	7,142,641
Bengkulu	3,150,143	3,205,841	3,664,592	3,806,128
Lampung	3,543,100	3,694,546	3,864,668	4,001,031
DKI Jakarta	28,508,375	29,865,648	30,514,513	31,832,209
Jawa Barat	5,581,721	5,689,177	5,793,841	5,956,962
Jawa Tengah	3,771,419	3,870,892	4,014,453	4,172,657
DI Yogyakarta	4,473,418	4,643,746	4,783,320	5,008,951
Jawa Timur	6,013,508	6,201,690	6,310,583	6,639,717
Bali	5,604,864	5,703,390	5,674,054	5,876,262
Nusa Tenggara Barat	3,204,720	3,254,388	3,486,824	3,655,516
Nusa Tenggara Timur	2,116,792	2,185,443	2,202,471	2,294,852
Kalimantan Barat	4,831,154	4,940,860	5,385,884	5,574,439
Kalimantan Tengah	5,918,570	6,054,866	6,795,957	7,084,993
Kalimantan Selatan	5,902,706	6,023,688	6,072,847	6,870,713
Kaimantan Timur	34,266,821	33,925,215	32,897,947	32,921,772
Sulawesi Utara	5,426,287	5,516,683	5,455,278	5,628,425
Sulawesi Tengah	4,074,672	4,198,068	4,591,602	4,850,069
Sulawesi Selatan	3,959,251	4,063,133	4,292,673	4,452,990
Sulawesi Tenggara	3,230,986	3,342,934	3,686,468	3,890,489
Maluku	2,378,051	2,444,241	2,426,679	2,493,680
Papua	10,502,733	10,712,128	10,827,005	8,689,755

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2013

**PDRB Per Kapita Antar Provinsi (Rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2001-2012**

Provinsi	2005	2006	2007	2008
Aceh	8,866,500	8,872,800	8,528,000	7,906,300
Sumatera Utara	7,078,300	7,393,300	7,926,500	8,137,200
Sumatera Barat	6,384,500	6,681,000	7,049,500	7,414,300
Riau	16,395,600	16,832,400	17,225,000	17,558,000
Jambi	4,761,500	4,956,500	4,962,700	5,175,900
Sumatera Selatan	7,282,000	7,547,800	7,814,700	8,042,100
Bengkulu	3,983,800	4,154,000	4,299,700	4,460,500
Lampung	4,147,800	4,293,200	4,449,000	4,616,300
DKI Jakarta	33,205,200	34,837,100	36,054,400	37,665,200
Jawa Barat	6,203,900	6,479,700	6,718,700	6,985,900
Jawa Tengah	4,488,100	4,690,000	4,959,800	5,202,700
DI Yogyakarta	5,024,800	5,157,300	5,444,900	5,643,800
Jawa Timur	7,027,500	7,392,900	7,840,800	8,236,100
Bali	6,187,900	6,443,800	6,417,700	6,912,200
Nusa Tenggara Barat	3,659,500	3,696,900	3,758,300	3,808,800
Nusa Tenggara Timur	2,305,700	2,376,000	2,467,600	2,528,700
Kalimantan Barat	5,830,400	6,029,600	6,126,400	6,324,500
Kalimantan Tengah	7,125,200	7,430,200	7,490,000	7,792,800
Kalimantan Selatan	7,065,600	7,306,600	7,559,700	7,871,600
Kalimantan Timur	32,537,100	32,689,200	30,841,100	31,145,000
Sulawesi Utara	5,944,800	6,222,000	6,548,100	7,147,200
Sulawesi Tengah	5,083,100	5,383,000	5,468,500	5,903,800
Sulawesi Selatan	4,862,900	5,117,500	5,314,700	5,646,000
Sulawesi Tenggara	4,126,500	4,347,300	4,432,500	4,647,400
Maluku	2,576,900	2,680,500	2,564,600	2,596,200
Papua	11,479,400	9,317,600	7,886,300	7,396,700

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2013

PDRB Per Kapita Antar Provinsi (Rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2000-2012

Provinsi	2009	2010	2011	2012
Aceh	7,310,900	7,333,900	7,565,200	7,797,200
Sumatera Utara	8,662,000	9,104,800	9,650,100	10,174,800
Sumatera Barat	7,645,400	7,986,200	8,416,100	8,857,300
Riau	17,470,500	17,541,000	17,880,100	17,929,800
Jambi	5,377,700	5,622,100	5,982,200	6,282,700
Sumatera Selatan	8,236,100	8,534,000	8,972,100	9,361,000
Bengkulu	4,642,700	4,838,900	5,091,200	5,356,800
Lampung	4,809,600	5,024,900	5,308,700	5,601,100
DKI Jakarta	39,083,900	41,015,100	43,389,800	45,702,600
Jawa Barat	7,156,300	7,451,100	7,828,800	8,180,000
Jawa Tengah	5,462,200	5,773,900	6,112,900	6,494,400
DI Yogyakarta	5,845,900	6,064,200	6,345,800	6,631,800
Jawa Timur	8,602,600	9,101,800	9,737,500	10,392,500
Bali	7,139,800	7,389,000	7,744,100	8,106,500
Nusa Tenggara Barat	4,230,400	4,442,900	4,274,900	4,189,900
Nusa Tenggara Timur	2,588,600	2,666,100	2,773,900	2,872,900
Kalimantan Barat	6,582,400	6,868,100	7,429,300	7,630,700
Kalimantan Tengah	8,097,600	8,464,100	8,923,700	9,379,800
Kalimantan Selatan	8,141,300	8,420,500	8,809,700	9,155,900
Kalimantan Timur	30,719,700	31,023,800	31,227,100	31,417,400
Sulawesi Utara	7,626,000	8,062,100	8,594,200	9,175,600
Sulawesi Tengah	6,249,000	6,659,800	7,169,100	7,701,600
Sulawesi Selatan	5,940,900	6,348,300	6,791,100	7,290,200
Sulawesi Tenggara	4,906,300	5,194,700	5,560,800	6,046,900
Maluku	2,666,700	2,758,200	2,860,000	3,008,200
Papua	8,572,500	7,851,800	7,066,300	16,882,900

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2013

**PDRB Per Kapita Awal ($Y_{C,t-1}$) Antar Prinvisi (Rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2001-2012**

Provinsi	2001	2002	2003	2004
Aceh	8,869,128	8,172,254	9,889,158	9,962,129
Sumatera Utara	5,954,604	6,098,204	6,296,246	6,609,292
Sumatera Barat	5,389,159	5,552,514	5,779,744	5,840,923
Riau	18,297,099	18,492,990	18,328,117	18,118,956
Jambi	4,004,453	4,164,936	4,293,564	4,356,169
Sumatera Selatan	5,993,701	5,955,255	6,032,978	6,989,906
Bengkulu	3,116,671	3,150,143	3,205,841	3,664,592
Lampung	3,452,890	3,543,100	3,694,546	3,864,668
DKI Jakarta	27,540,890	28,508,375	29,865,648	30,514,513
Jawa Barat	5,443,902	5,581,721	5,689,177	5,793,841
Jawa Tengah	3,682,731	3,771,419	3,870,892	4,014,453
DI Yogyakarta	4,356,627	4,473,418	4,643,746	4,783,320
Jawa Timur	5,858,174	6,013,508	6,201,690	6,310,583
Bali	5,700,203	5,604,864	5,703,390	5,674,054
Nusa Tenggara Barat	2,995,086	3,204,720	3,254,388	3,486,824
Nusa Tenggara Timur	2,046,042	2,116,792	2,185,443	2,202,471
Kalimantan Barat	4,848,808	4,831,154	4,940,860	5,385,884
Kalimantan Tengah	5,931,258	5,918,570	6,054,866	6,795,957
Kalimantan Selatan	2,153,021	5,902,706	6,023,688	6,072,847
Kaimantan Timur	33,525,258	34,266,821	33,925,215	32,897,947
Sulawesi Utara	5,239,433	5,426,287	5,516,683	5,455,278
Sulawesi Tengah	3,971,174	4,074,672	4,198,068	4,591,602
Sulawesi Selatan	3,824,988	3,959,251	4,063,133	4,292,673
Sulawesi Tenggara	3,153,611	3,230,986	3,342,934	3,686,468
Maluku	2,148,268	2,378,051	2,444,241	2,426,679
Papua	11,075,327	10,502,733	10,712,128	10,827,005

Sumber: data diolah

**PDRB Per Kapita Awal (YC_{t-1}) Antar Provinsi (Rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2001-2012**

Provinsi	2005	2006	2007	2008
Aceh	9,873,669	8,866,500	8,872,800	8,528,000
Sumatera Utara	6,873,420	7,078,300	7,393,300	7,926,500
Sumatera Barat	6,080,565	6,384,500	6,681,000	7,049,500
Riau	16,642,318	16,395,600	16,832,400	17,225,000
Jambi	4,553,310	4,761,500	4,956,500	4,962,700
Sumatera Selatan	7,142,641	7,282,000	7,547,800	7,814,700
Bengkulu	3,806,128	3,983,800	4,154,000	4,299,700
Lampung	4,001,031	4,147,800	4,293,200	4,449,000
DKI Jakarta	31,832,209	33,205,200	34,837,100	36,054,400
Jawa Barat	5,956,962	6,203,900	6,479,700	6,718,700
Jawa Tengah	4,172,657	4,488,100	4,690,000	4,959,800
DI Yogyakarta	5,008,951	5,024,800	5,157,300	5,444,900
Jawa Timur	6,639,717	7,027,500	7,392,900	7,840,800
Bali	5,876,262	6,187,900	6,443,800	6,417,700
Nusa Tenggara Barat	3,655,516	3,659,500	3,696,900	3,758,300
Nusa Tenggara Timur	2,294,852	2,305,700	2,376,000	2,467,600
Kalimantan Barat	5,574,439	5,830,400	6,029,600	6,126,400
Kalimantan Tengah	7,084,993	7,125,200	7,430,200	7,490,000
Kalimantan Selatan	6,870,713	7,065,600	7,306,600	7,559,700
Kalimantan Timur	32,921,772	32,537,100	32,689,200	30,841,100
Sulawesi Utara	5,628,425	5,944,800	6,222,000	6,548,100
Sulawesi Tengah	4,850,069	5,083,100	5,383,000	5,468,500
Sulawesi Selatan	4,452,990	4,862,900	5,117,500	5,314,700
Sulawesi Tenggara	3,890,489	4,126,500	4,347,300	4,432,500
Maluku	2,493,680	2,576,900	2,680,500	2,564,600
Papua	8,689,755	11,479,400	9,317,600	7,886,300

Sumber: data diolah

**PDRB Per Kapita Awal (YC_{t-1}) Antar Provinsi (Rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2001-2012**

Provinsi	2009	2010	2011	2012
Aceh	7,906,300	7,310,900	7,333,900	7,565,200
Sumatera Utara	8,137,200	8,662,000	9,104,800	9,650,100
Sumatera Barat	7,414,300	7,645,400	7,986,200	8,416,100
Riau	17,558,000	17,470,500	17,541,000	17,880,100
Jambi	5,175,900	5,377,700	5,622,100	5,982,200
Sumatera Selatan	8,042,100	8,236,100	8,534,000	8,972,100
Bengkulu	4,460,500	4,642,700	4,838,900	5,091,200
Lampung	4,616,300	4,809,600	5,024,900	5,308,700
DKI Jakarta	37,665,200	39,083,900	41,015,100	43,389,800
Jawa Barat	6,985,900	7,156,300	7,451,100	7,828,800
Jawa Tengah	5,202,700	5,462,200	5,773,900	6,112,900
DI Yogyakarta	5,643,800	5,845,900	6,064,200	6,345,800
Jawa Timur	8,236,100	8,602,600	9,101,800	9,737,500
Bali	6,912,200	7,139,800	7,389,000	7,744,100
Nusa Tenggara Barat	3,808,800	4,230,400	4,442,900	4,274,900
Nusa Tenggara Timur	2,528,700	2,588,600	2,666,100	2,773,900
Kalimantan Barat	6,324,500	6,582,400	6,868,100	7,429,300
Kalimantan Tengah	7,792,800	8,097,600	8,464,100	8,923,700
Kalimantan Selatan	7,871,600	8,141,300	8,420,500	8,809,700
Kalimantan Timur	31,145,000	30,719,700	31,023,800	31,227,100
Sulawesi Utara	7,147,200	7,626,000	8,062,100	8,594,200
Sulawesi Tengah	5,903,800	6,249,000	6,659,800	7,169,100
Sulawesi Selatan	5,646,000	5,940,900	6,348,300	6,791,100
Sulawesi Tenggara	4,647,400	4,906,300	5,194,700	5,560,800
Maluku	2,596,200	2,666,700	2,758,200	2,860,000
Papua	7,396,700	8,572,500	7,851,800	7,066,300

Sumber: data diolah

**Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Provinsi (Juta US\$)
Tahun 2001-2012 Berdasarkan Jumlah Investasi**

Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Aceh	64.4	1.2	82.5	9.5	1	2
Sumatera Utara	1192.9	2275.5	57.6	151.6	59.9	58.2
Sumatera Barat	7.5	8	45.3	32	37	1.6
Riau	5706.4	1474.3	1175.3	214.9	795.8	585.4
Jambi	1055.4	447.4	0.6	35.7	10.2	82
Sumatera Selatan	625.6	12	1.1	27.4	125	27.8
Bengkulu	50	72.3	159.2	1.4	12.9	13
Lampung	655.6	1680.6	1	265	72.2	116.1
DKI Jakarta	7846.6	4013.6	7430.6	8102.4	3266.9	1468.4
Jawa Barat	4614.3	5001.7	5611.6	1728.3	2567.3	1619.3
Jawa Tengah	2179.3	1462.9	89.7	3373.3	23.9	380.1
DI Yogyakarta	105.9	43.4	17.4	3.4	17.3	48.8
Jawa Timur	3229.6	1673.6	417.7	325.4	702.2	384.3
Bali	540.2	28.8	198.5	416.4	97.5	102.5
Nusa Tenggara Barat	566.5	0.4	2805.6	15.9	3.6	4.9
Nusa Tenggara Timur	1080.9	15	0.4	3	1.5	2.4
Kalimantan Barat	10.1	23.7	33	38.7	60.5	2
Kalimantan Tengah	164.3	586.7	32.2	24.3	82	22.4
Kalimantan Selatan	188.4	149.4	2.1	7	0.5	107.9
Kaimantan Timur	3419.1	2084.5	713.4	88.3	38.8	402.3
Sulawesi Utara	533.2	3452.8	181.3	50	16	1.3
Sulawesi Tengah	1068.3	127.8	125	0.5	1	0.6
Sulawesi Selatan	16403.7	141.1	10	226.1	67.1	13.2
Sulawesi Tenggara	300.5	3181.9	43.8	1	1	0.4
Maluku	150	680	3	58.8	9.1	20
Papua	3137.5	154.2	222	49	49	0.6

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2012

**Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Provinsi (Juta US\$)
Tahun 2001-2012 Berdasarkan Jumlah Investasi**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	17.4	15	0.4	4.6	22.5	172.3
Sumatera Utara	189.7	127.2	139.7	181.1	753.7	645.3
Sumatera Barat	58.7	28.1	0.2	7.9	22.9	75.0
Riau	724	460.9	251.6	86.6	212.3	1,152.9
Jambi	17.6	36.1	40.5	37.2	19.5	156.3
Sumatera Selatan	213.8	114.7	56.8	186.3	557.3	786.4
Bengkulu	50	13.0	1.1	25.1	43.1	30.4
Lampung	124.5	67.0	32.7	30.7	79.5	114.3
DKI Jakarta	4676.9	9,927.6	5,510.8	6,429.3	4,824.1	4,107.7
Jawa Barat	1326.9	2,552.2	1,934.4	1,692.0	3,839.4	4,210.7
Jawa Tengah	100.7	135.6	83.1	59.1	175.0	241.5
DI Yogyakarta	0.8	16.7	8.1	4.9	2.4	84.9
Jawa Timur	1689.6	457.1	422.1	1,769.2	1,312.0	2,298.8
Bali	50.4	81.0	227.2	278.3	482.1	482.0
Nusa Tenggara Barat	5.9	14.4	2.9	220.5	465.1	635.8
Nusa Tenggara Timur	0.4	1.4	4.0	3.8	5.5	8.7
Kalimantan Barat	11.2	39.8	27.8	170.4	500.7	397.5
Kalimantan Tengah	77.6	62.7	4.9	546.6	543.7	524.7
Kalimantan Selatan	59.8	0.2	171.8	202.2	272.1	272.3
Kalimantan Timur	152	12.6	79.9	1,092.2	602.4	2,014.1
Sulawesi Utara	9.7	35.5	57.7	226.8	220.2	46.7
Sulawesi Tengah	7.1	1.5	3.3	138.5	370.4	806.5
Sulawesi Selatan	62.8	27.9	77.0	441.8	89.6	582.6
Sulawesi Tenggara	300.5	0.5	3.6	14.0	17.0	35.7
Maluku	10	15	5	2.9	11.7	8.5
Papua	0.4	17.8	1.8	329.6	1,312.0	1,202.4

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2012

**Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi Dana Perimbangan (Rupiah)
Seluruh Indonesia Tahun 2001-2012**

Provinsi	2001	2002	2003	2004
Aceh	443,668,182	702,196,124	772,146,880	1,205,286,145
Sumatera Utara	460,221,648	385,684,965	484,991,624	512,975,463
Sumatera Barat	263,570,311	235,578,027	282,135,643	296,263,749
Riau	1,199,633,155	1,028,330,220	1,150,896,013	1,248,715,798
Jambi	177,451,363	232,946,044	287,144,584	355,478,094
Sumatera Selatan	362,957,015	438,391,040	499,942,998	575,979,889
Bengkulu	147,521,881	173,554,647	228,913,080	239,606,415
Lampung	273,625,402	328,183,700	393,449,019	410,775,132
DKI Jakarta	3,684,456,140	3,726,983,145	4,497,794,511	5,096,297,651
Jawa Barat	942,698,337	831,284,765	948,581,196	1,197,663,954
Jawa Tengah	875,304,113	717,960,515	716,535,646	789,076,690
D I Yogyakarta	244,031,833	240,927,802	238,620,045	283,268,472
Jawa Timur	861,506,405	746,760,390	780,561,188	862,509,974
Bali	191,112,282	211,220,087	236,642,224	236,938,134
Nusa Tenggara Barat	273,231,380	246,424,011	290,014,870	294,335,979
Nusa Tenggara Timur	287,048,757	264,084,348	311,585,359	333,935,257
Kalimantan Barat	257,055,475	268,199,103	323,943,320	346,854,224
Kalimantan Tengah	269,920,427	265,808,948	313,938,678	349,214,595
Kalimantan Selatan	259,216,625	285,594,387	278,459,889	301,858,881
Kalimantan Timur	1,532,601,569	1,347,494,285	1,578,816,447	1,827,165,086
Sulawesi Utara	234,821,433	287,927,301	271,878,837	244,934,087
Sulawesi Tengah	165,203,553	205,358,194	265,330,005	282,135,368
Sulawesi Selatan	323,892,306	333,717,522	403,482,669	446,743,220
Sulawesi Tenggara	169,920,965	189,378,000	253,507,935	256,467,508
Maluku	218,025,896	207,721,364	270,757,487	307,584,789
Papua	710,332,389	562,227,367	651,175,519	575,324,060

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2001-2013

**Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi Dana Perimbangan (Rupiah)
Seluruh Indonesia Tahun 2001-2012**

Provinsi	2005	2006	2007	2008
Aceh	2,169,014,546	1,766,517,900	1,804,922,903	2,605,330,983
Sumatera Utara	518,391,297	738,653,000	951,081,298	1,039,050,126
Sumatera Barat	310,066,307	529,357,000	633,865,693	744,202,076
Riau	1,783,743,461	1,811,458,000	2,135,945,285	2,687,363,826
Jambi	393,688,552	532,035,039	686,556,647	745,860,901
Sumatera Selatan	786,818,756	983,582,838	1,280,897,605	1,424,573,687
Bengkulu	254,143,754	398,183,599	445,656,243	529,784,756
Lampung	496,229,872	609,812,170	686,784,795	817,632,624
DKI Jakarta	5,770,008,024	6,384,000,000	7,253,024,683	8,702,813,394
Jawa Barat	1,220,120,700	1,106,539,705	1,756,094,285	1,903,729,826
Jawa Tengah	807,132,660	808,406,000	1,419,342,557	1,504,184,018
D I Yogyakarta	277,237,968	448,979,275	480,922,835	601,802,167
Jawa Timur	909,866,655	1,169,773,000	1,755,896,027	1,798,151,003
Bali	261,364,428	430,909,953	525,304,234	576,550,871
Nusa Tenggara Barat	325,956,114	482,130,000	534,453,304	626,994,173
Nusa Tenggara Timur	349,951,347	513,639,600	608,328,369	708,740,588
Kalimantan Barat	378,683,287	643,837,102	711,607,636	865,203,181
Kalimantan Tengah	372,614,589	631,500,000	726,574,032	859,670,385
Kalimantan Selatan	388,055,704	494,484,874	623,583,487	790,997,259
Kalimantan Timur	2,792,313,824	1,566,792,000	3,096,452,203	4,050,186,678
Sulawesi Utara	275,479,569	435,302,347	496,496,761	613,566,528
Sulawesi Tengah	309,461,557	501,861,815	562,092,462	701,889,829
Sulawesi Selatan	476,672,728	622,753,932	810,026,105	894,934,381
Sulawesi Tenggara	283,934,454	467,596,020	516,641,000	657,211,240
Maluku	321,525,302	464,531,450	535,176,984	648,432,736
Papua	684,333,580	1,033,720,123	2,043,981,643	1,436,993,483

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2001-2013

**Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi Dana Perimbangan (Rupiah)
Seluruh Indonesia Tahun 2001-2012**

Provinsi	2009	2010	2011	2012
Aceh	1,570,603,947	1,551,798,667	2,262,044,905	1,972,238,000
Sumatera Utara	1,167,565,492	1,175,257,687	1,373,897,545	1,686,144,433
Sumatera Barat	789,839,834	769,696,966	897,640,879	1,054,459,770
Riau	1,879,148,800	1,706,101,117	3,226,836,381	2,998,998,652
Jambi	802,060,280	801,124,865	1,075,207,719	1,019,543,053
Sumatera Selatan	1,333,161,326	1,575,609,789	1,992,557,000	2,205,077,535
Bengkulu	589,497,876	603,718,339	712,256,295	854,530,115
Lampung	829,026,291	837,195,820	1,063,287,255	1,192,114,809
DKI Jakarta	8,650,835,930	10,306,090,000	9,149,708,963	9,111,459,442
Jawa Barat	2,172,729,228	2,105,354,014	2,526,078,027	2,235,856,731
Jawa Tengah	1,691,853,080	1,757,663,524	1,950,189,365	2,130,486,342
D I Yogyakarta	631,011,121	615,334,816	722,339,653	850,513,085
Jawa Timur	2,093,556,409	2,412,237,705	2,528,086,450	2,785,080,972
Bali	636,608,487	638,093,162	705,288,133	852,217,765
Nusa Tenggara Barat	701,175,944	781,931,209	855,310,099	1,046,195,367
Nusa Tenggara Timur	767,566,614	762,640,259	887,291,439	1,102,993,489
Kalimantan Barat	970,706,171	914,712,391	1,037,860,159	1,207,642,847
Kalimantan Tengah	913,061,727	961,086,975	1,083,088,116	1,199,620,348
Kalimantan Selatan	1,004,989,665	904,818,954	1,195,565,014	1,038,922,552
Kalimantan Timur	3,122,061,454	4,015,478,570	5,295,875,915	4,392,796,000
Sulawesi Utara	674,267,802	666,513,930	729,361,142	889,074,421
Sulawesi Tengah	756,439,213	744,569,736	864,098,666	988,224,643
Sulawesi Selatan	914,502,834	952,354,111	1,106,989,189	1,323,873,981
Sulawesi Tenggara	705,062,822	726,362,930	817,385,234	1,010,575,505
Maluku	704,206,719	717,186,986	828,272,878	950,038,311
Papua	1,563,054,901	1,516,927,760	1,893,484,847	2,155,377,790

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2001-2013

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Persen
Seluruh Indonesia 2001-2012**

Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Aceh	65	66.0	66	68.7	69.05	69.41
Sumatera Utara	67.7	68.8	70.1	71.4	72.03	72.46
Sumatera Barat	66.65	67.5	69	70.5	71.19	71.65
Riau	68.2	69.1	70.65	72.2	73.63	73.81
Jambi	66.25	67.1	68.6	70.1	70.95	71.29
Sumatera Selatan	64.95	66.0	67.8	69.6	70.23	71.09
Bengkulu	65.5	66.2	68.05	69.9	71.09	71.28
Lampung	64.4	65.8	67.1	68.4	68.85	69.38
DKI Jakarta	74.05	75.6	75.7	75.8	76.07	76.33
Jawa Barat	65.2	65.8	67.45	69.1	69.93	70.32
Jawa Tengah	65.45	66.3	67.6	68.9	69.78	70.25
Yogyakarta	69.75	70.8	71.85	72.9	73.50	73.70
Jawa Timur	62.95	64.1	65.45	66.8	68.42	69.18
Bali	66.6	67.5	68.3	69.1	69.78	70.07
Nusa Tenggara Barat	56	57.8	59.2	60.6	62.42	63.04
Nusa Tenggara Timur	60.35	60.3	61.5	62.7	63.59	64.83
Kalimantan Barat	61.75	62.9	64.15	65.4	66.20	67.08
Kalimantan Tengah	67.9	69.1	70.4	71.7	73.22	73.40
Kalimantan Selatan	53.25	64.3	65.5	66.7	67.44	67.75
Kalimantan Timur	68.9	70.0	71.1	72.2	72.94	73.26
Sulawesi Utara	69.2	71.3	72.35	73.4	74.21	74.37
Sulawesi Tengah	63.6	64.4	65.85	67.3	68.47	68.85
Sulawesi Selatan	64.45	65.3	66.55	67.8	68.06	68.81
Sulawesi Tenggara	63.5	64.1	65.85	66.7	67.52	67.80
Maluku	66.85	66.5	67.75	69.0	69.24	69.69
Papua	59.45	60.1	60.5	60.9	62.08	62.75

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2013

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Persen
Seluruh Indonesia 2001-2012**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	70.35	70.76	71.31	71.70	72.16	72.51
Sumatera Utara	72.78	73.29	73.80	74.19	74.65	75.13
Sumatera Barat	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28	74.70
Riau	74.63	75.09	75.60	76.07	76.53	76.90
Jambi	71.46	71.99	72.45	72.74	73.3	73.78
Sumatera Selatan	71.40	72.05	72.61	72.95	73.42	73.99
Bengkulu	71.57	72.14	72.55	72.92	73.4	73.93
Lampung	69.78	70.30	70.93	71.42	71.94	72.45
DKI Jakarta	76.59	77.03	77.36	77.60	77.97	78.33
Jawa Barat	70.71	71.12	71.64	72.29	72.73	73.11
Jawa Tengah	70.92	71.60	72.10	72.49	72.94	73.36
Yogyakarta	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32	76.75
Jawa Timur	69.78	70.38	71.06	71.62	72.18	72.83
Bali	70.53	70.98	71.52	72.28	72.84	73.49
Nusa Tenggara Barat	63.71	64.12	64.66	65.20	66.23	66.89
Nusa Tenggara Timur	65.36	66.15	66.60	67.26	67.75	68.28
Kalimantan Barat	67.53	68.17	68.79	69.15	69.66	70.31
Kalimantan Tengah	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06	75.46
Kalimantan Selatan	68.01	68.72	69.30	69.92	70.44	71.08
Kalimantan Timur	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22	76.71
Sulawesi Utara	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54	76.95
Sulawesi Tengah	69.34	70.09	70.70	71.14	71.62	72.14
Sulawesi Selatan	69.62	70.22	70.94	71.62	72.14	72.70
Sulawesi Tenggara	68.32	69.00	69.52	70.00	70.55	71.05
Maluku	69.96	70.38	70.96	71.42	71.87	72.42
Papua	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36	65.86

Sumber: Statistik Indonesia 2001-2013

Penghitungan Konvergensi Sigma (*Sigma Convergence*)

Logaritma PDRB Per Kapita Seluruh Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012

Provinsi	2001	2002	2003	2004
Aceh	6.9123419	6.9951593	6.998352	6.994479
Sumatera Utara	6.7852019	6.7990817	6.820155	6.837173
Sumatera Barat	6.7444897	6.7619086	6.766481	6.783944
Riau	7.2670071	7.2631178	7.258133	7.221214
Jambi	6.6196083	6.6328179	6.639105	6.658327
Sumatera Selatan	6.7749004	6.7805317	6.844471	6.853859
Bengkulu	6.4983303	6.505942	6.564026	6.580483
Lampung	6.5493834	6.5675611	6.587112	6.602172
DKI Jakarta	7.4549725	7.4751719	7.484506	7.502867
Jawa Barat	6.7467681	6.7550494	6.762967	6.775025
Jawa Tengah	6.5765048	6.5878111	6.603626	6.620413
DI Yogyakarta	6.6506395	6.6668685	6.679729	6.699747
Jawa Timur	6.7791279	6.7925101	6.800069	6.82215
Bali	6.7485651	6.7561331	6.753893	6.769101
Nusa Tenggara Barat	6.5057901	6.5124693	6.54243	6.562949
Nusa Tenggara Timur	6.3256782	6.3395395	6.34291	6.360755
Kalimantan Barat	6.6840509	6.6938025	6.731257	6.746201
Kalimantan Tengah	6.7722168	6.7821045	6.832251	6.850339
Kalimantan Selatan	6.7710512	6.7798625	6.783392	6.837002
Kalimantan Timur	7.5348738	7.5305226	7.517169	7.517483
Sulawesi Utara	6.7345028	6.741678	6.736817	6.750387
Sulawesi Tengah	6.6100927	6.6230495	6.661964	6.685748
Sulawesi Selatan	6.597613	6.608861	6.632728	6.648652
Sulawesi Tenggara	6.5093351	6.5241278	6.56661	6.590004
Maluku	6.3762212	6.388144	6.385012	6.396841
Papua	7.0213023	7.0298758	7.034508	6.939008
Standar Deviasi	0.2918302	0.291482	0.284573	0.275624

Sumber: data diolah

Penghitungan Konvergensi Sigma (*Sigma Convergence*)

Logaritma PDRB Per Kapita Seluruh Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012

Provinsi	2005	2006	2007	2008
Aceh	6.947752	6.948061	6.930847	6.897973
Sumatera Utara	6.849929	6.868838	6.899081	6.910475
Sumatera Barat	6.805127	6.824841	6.848158	6.87007
Riau	7.214727	7.226146	7.236159	7.244475
Jambi	6.677744	6.695175	6.695718	6.713986
Sumatera Selatan	6.862251	6.87782	6.892912	6.905369
Bengkulu	6.600298	6.618466	6.633438	6.649384
Lampung	6.617818	6.632781	6.648262	6.664294
DKI Jakarta	7.521206	7.542042	7.556958	7.57594
Jawa Barat	6.792665	6.811555	6.827285	6.844222
Jawa Tengah	6.652063	6.671173	6.695464	6.716229
DI Yogyakarta	6.701119	6.712422	6.73599	6.751572
Jawa Timur	6.846801	6.868815	6.89436	6.915722
Bali	6.791543	6.809142	6.807379	6.839616
Nusa Tenggara Barat	6.563422	6.567838	6.574991	6.580788
Nusa Tenggara Timur	6.362803	6.375846	6.392275	6.402897
Kalimantan Barat	6.765698	6.780289	6.787205	6.801026
Kalimantan Tengah	6.852797	6.871001	6.874482	6.891694
Kalimantan Selatan	6.849149	6.863715	6.878505	6.896063
Kalimantan Timur	7.512379	7.514404	7.48913	7.493388
Sulawesi Utara	6.774137	6.79393	6.816115	6.854136
Sulawesi Tengah	6.706129	6.731024	6.737868	6.771132
Sulawesi Selatan	6.686895	6.709058	6.725479	6.751741
Sulawesi Tenggara	6.615582	6.63822	6.646649	6.66721
Maluku	6.411098	6.428216	6.40902	6.414338
Papua	7.059919	6.969304	6.896873	6.869038
Standar Deviasi	0.273948	0.269432	0.265784	0.264401

Sumber: data diolah

Penghitungan Konvergensi Sigma (*Sigma Convergence*)

Logaritma PDRB Per Kapita Seluruh Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012

Provinsi	2009	2010	2011	2012
Aceh	6.863971	6.865335	6.87882	6.891939
Sumatera Utara	6.937618	6.95927	6.984532	7.007526
Sumatera Barat	6.8834	6.90234	6.925111	6.947301
Riau	7.242305	7.244054	7.25237	7.253575
Jambi	6.730597	6.749899	6.776861	6.798146
Sumatera Selatan	6.915722	6.931153	6.952894	6.971322
Bengkulu	6.666771	6.684747	6.70682	6.728905
Lampung	6.682109	6.701127	6.724988	6.748273
DKI Jakarta	7.591998	7.612944	7.637388	7.659941
Jawa Barat	6.854689	6.87222	6.893695	6.912753
Jawa Tengah	6.737368	6.761469	6.786247	6.812539
DI Yogyakarta	6.766851	6.782774	6.802486	6.821631
Jawa Timur	6.93463	6.959127	6.988447	7.01672
Bali	6.853686	6.868586	6.888971	6.908833
Nusa Tenggara Barat	6.626381	6.647667	6.630926	6.622204
Nusa Tenggara Timur	6.413065	6.425876	6.443091	6.458321
Kalimantan Barat	6.818384	6.836837	6.870948	6.882564
Kalimantan Tengah	6.908356	6.927581	6.950545	6.972194
Kalimantan Selatan	6.910694	6.925338	6.944961	6.961701
Kaimantan Timur	7.487417	7.491695	7.494532	7.49717
Sulawesi Utara	6.882297	6.906448	6.934205	6.962634
Sulawesi Tengah	6.795811	6.823461	6.855465	6.886581
Sulawesi Selatan	6.773852	6.802657	6.83194	6.862739
Sulawesi Tenggara	6.690754	6.71556	6.745137	6.781533
Maluku	6.425974	6.440626	6.456366	6.478307
Papua	6.933107	6.894969	6.849192	7.227447
Standar Deviasi	0.260441	0.258169	0.257857	0.263602

Sumber: data diolah

Uji F Konvergensi Absolut

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: ABSOLUT
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.346891	(25,285)	0.1288
Cross-section Chi-square	34.842305	25	0.0911

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/12/14 Time: 08:42
 Sample: 2001 2012
 Included observations: 12
 Cross-sections included: 26
 Total pool (balanced) observations: 312

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.959363	0.015666	61.23953	0.0000
LOG(X1?)	0.061313	0.000998	61.44019	0.0000
R-squared	0.924111	Mean dependent var		1.921089
Adjusted R-squared	0.923866	S.D. dependent var		0.040374
S.E. of regression	0.011140	Akaike info criterion		-6.150140
Sum squared resid	0.038472	Schwarz criterion		-6.126147
Log likelihood	961.4219	Hannan-Quinn criter.		-6.140551
F-statistic	3774.897	Durbin-Watson stat		1.671147
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman Konvergensi Absolut

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: ABSOLUT

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.380157	1	0.1229

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	0.055083	0.061208	0.000016	0.1229

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel Least Squares

Date: 12/12/14 Time: 08:43

Sample: 2001 2012

Included observations: 12

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 312

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.057086	0.064677	16.34411	0.0000
LOG(X1?)	0.055083	0.004123	13.35938	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.932129	Mean dependent var	1.921089
Adjusted R-squared	0.925938	S.D. dependent var	0.040374
S.E. of regression	0.010987	Akaike info criterion	-6.101558
Sum squared resid	0.034407	Schwarz criterion	-5.777644
Log likelihood	978.8431	Hannan-Quinn criter.	-5.972100
F-statistic	150.5451	Durbin-Watson stat	1.833635
Prob(F-statistic)	0.000000		

Penghitungan Konvergensi Absolut Dengan Pendekatan *Random Effect Model*

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/12/14 Time: 08:44
 Sample: 2001 2012
 Included observations: 12
 Cross-sections included: 26
 Total pool (balanced) observations: 312
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.961017	0.017482	54.97239	0.0000
LOG(X1?)	0.061208	0.001114	54.96367	0.0000
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	-0.000628			
_SUMUT--C	0.000157			
_SUMBAR--C	-0.000101			
_RIAU--C	-0.000438			
_JAMBI--C	-0.000215			
_SUMSEL--C	0.002671			
_BENGKULU--C	-0.000282			
_LAMPUNG--C	-0.000292			
_DKI--C	-0.000232			
_JABAR--C	0.001917			
_JATENG--C	-0.000111			
_DIY--C	-0.000191			
_JATIM--C	0.000196			
_BALI--C	-0.000138			
_NTB--C	-0.000620			
_NTT--C	-0.001207			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.001743	0.0246
Idiosyncratic random		0.010987	0.9754

Weighted Statistics			
R-squared	0.906559	Mean dependent var	1.683527
Adjusted R-squared	0.906258	S.D. dependent var	0.035966
S.E. of regression	0.011012	Sum squared resid	0.037591
F-statistic	3007.615	Durbin-Watson stat	1.709706
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.924108	Mean dependent var	1.921089
Sum squared resid	0.038473	Durbin-Watson stat	1.670523

Uji F Konvergensi Kondisional

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: KONDISIONAL
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.708904	(25,282)	0.0210
Cross-section Chi-square	44.012024	25	0.0108

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/27/14 Time: 05:15
 Sample: 2001 2012
 Included observations: 12
 Cross-sections included: 26
 Total pool (balanced) observations: 312

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.954916	0.016846	56.68612	0.0000
LOG(X1?)	0.059001	0.001581	37.31199	0.0000
LOG(X2?)	0.000411	0.000280	1.469344	0.1428
LOG(X3?)	0.001512	0.001190	1.270870	0.2047
X4?	3.33E-05	0.000186	0.178784	0.8582
R-squared	0.925217	Mean dependent var		1.921089
Adjusted R-squared	0.924242	S.D. dependent var		0.040374
S.E. of regression	0.011113	Akaike info criterion		-6.145593
Sum squared resid	0.037911	Schwarz criterion		-6.085609
Log likelihood	963.7125	Hannan-Quinn criter.		-6.121619
F-statistic	949.5505	Durbin-Watson stat		1.704452
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman Konvergensi Kondisional

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: KONDISIONAL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.830098	4	0.0079

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	0.039399	0.058628	0.000040	0.0025
LOG(X2?)	0.000232	0.000384	0.000000	0.4485
LOG(X3?)	0.006257	0.001818	0.000006	0.0784
X4?	0.000046	0.000023	0.000000	0.9676

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/27/14 Time: 05:20

Sample: 2001 2012

Included observations: 12

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 312

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.167689	0.083677	13.95471	0.0000
LOG(X1?)	0.039399	0.006581	5.987033	0.0000
LOG(X2?)	0.000232	0.000348	0.665073	0.5065
LOG(X3?)	0.006257	0.002820	2.219246	0.0273
X4?	4.63E-05	0.000606	0.076457	0.9391

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.935056	Mean dependent var	1.921089
Adjusted R-squared	0.928377	S.D. dependent var	0.040374
S.E. of regression	0.010805	Akaike info criterion	-6.126401
Sum squared resid	0.032923	Schwarz criterion	-5.766496
Log likelihood	985.7185	Hannan-Quinn criter.	-5.982558
F-statistic	140.0065	Durbin-Watson stat	1.861522
Prob(F-statistic)	0.000000		

Penghitungan Konvergensi Kondisional Dengan Pendekatan *Fixed Effect*

Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 11/26/14 Time: 14:33
 Sample: 2001 2012
 Included observations: 12
 Cross-sections included: 26
 Total pool (balanced) observations: 312
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.982152	0.018993	51.71160	0.0000
LOG(X1?)	0.056742	0.001687	33.62517	0.0000
LOG(X2?)	0.000124	5.49E-05	2.266212	0.0242
LOG(X3?)	0.001348	0.000582	2.316128	0.0213
X4?	0.000273	0.000109	2.502114	0.0129
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	-0.001954			
_SUMUT--C	0.000445			
_SUMBAR--C	-2.44E-06			
_RIAU--C	0.000149			
_JAMBI--C	-0.001915			
_SUMSEL--C	0.011571			
_BENGKULU--C	-0.002438			
_LAMPUNG--C	-0.002692			
_DKI--C	0.001178			
_JABAR--C	0.006838			
_JATENG--C	-0.002785			
_DIY--C	-0.001884			
_JATIM--C	0.000567			
_BALI--C	-4.16E-05			
_NTB--C	-0.002470			
_NTT--C	-0.007365			
_KALBAR--C	0.000547			
_KALTENG--C	0.000266			
_KALSEL--C	0.006650			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.999038	Mean dependent var	9.676089
Adjusted R-squared	0.998939	S.D. dependent var	5.594326
S.E. of regression	0.008839	Sum squared resid	0.022033
F-statistic	10099.70	Durbin-Watson stat	1.825538
Prob(F-statistic)	0.000000		